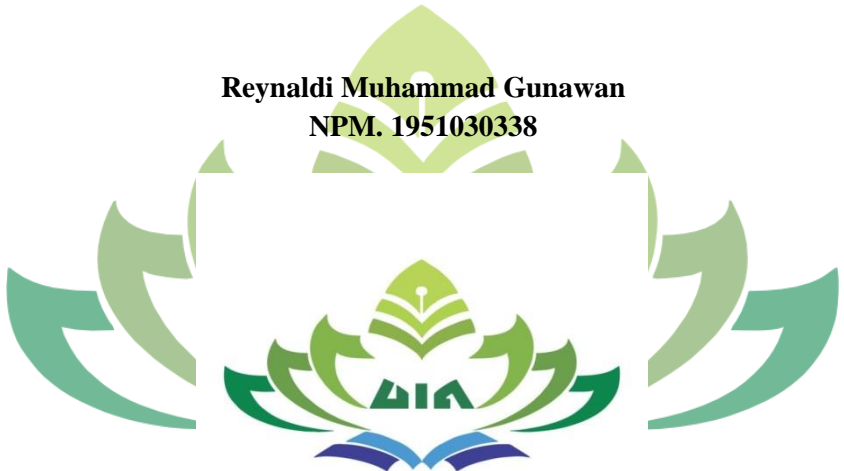


**PENGARUH TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS
PENGELOLAAN DANA DESA TERHADAP KEPERCAYAAN
MASYARAKAT DITINJAU DALAM PERSPEKTIF
AKUNTANSI SYARIAH
(Studi di Desa Talang Baru Kecamatan Sidomulyo Kabupaten
Lampung Selatan)**

SKRIPSI

**Reynaldi Muhammad Gunawan
NPM. 1951030338**



Program Studi Akuntansi Syariah

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
TAHUN AJARAN 1445 H/2023**

**PENGARUH TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS
PENGELOLAAN DANA DESA TERHADAP KEPERCAYAAN
MASYARAKAT DITINJAU DALAM PERSPEKTIF
AKUNTANSI SYARIAH**

**(Studi di Desa Talang Baru Kecamatan Sidomulyo Kabupaten
Lampung Selatan)**

SKRIPSI

**Diajukan untuk melengkapi Tugas – tugas dan memenuhi Syarat
– syarat Guna Memproleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun)
dalam Ilmu Ekonomi dan Bisnis Islam**



**Pembimbing I : Any Eliza, S.E., M.Ak
Pembimbing II : Agus Kurniawan, S.E., M.S.Ak.**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
TAHUN AJARAN 1445 H/2023**

ABSTRAK

Desa merupakan salah satu indikator dalam kemajuan sebuah Negara, maju atau tidaknya suatu desa salah satunya tergantung dari bagaimana cara pengelolaan dana desa yang diberikan. Pengelolaan dana desa merupakan sesuatu yang harus dilakukan dengan harapan dapat berkembang menjadi daerah yang maju dan sejahtera. Besarnya dana yang dikelola pemerintah desa terdapat kekhawatiran yang tidak kalah besarnya, yaitu tingginya potensi tindakan korupsi dan ketidaksiapan Sumber Daya Manusia yang berakibat pengelolaan dana tidak transparan, potensi finansial dana desa yang besar. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana desa terhadap kepercayaan masyarakat di desa talang baru kecamatan sidomulyo kabupaten lampung selatan.

Dalam penelitian ini metode penelitian yang digunakan yaitu kuantitatif jenis *survey research* dengan analisis regresi linier berganda. Populasi dan sampel dalam penelitian ini adalah warga desa talang baru kecamatan sidomulyo kabupaten lampung selatan berjumlah 70 orang dengan menggunakan metode slovin dan diambil menggunakan teknik *accidental sampling*.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa transparansi pengelolaan dana desa tidak berpengaruh terhadap kepercayaan masyarakat. Akuntabilitas pengelolaan dana desa berpengaruh terhadap kepercayaan masyarakat. Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana desa secara simultan berpengaruh terhadap kepercayaan masyarakat. Dalam perspektif akuntansi syariah transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana desa terhadap kepercayaan masyarakat di desa talang baru sudah sesuai dengan ajaran islam.

Kata Kunci : *Transparansi, Akuntabilitas, Kepercayaan Masyarakat, Dana Desa*

ABSTRACT

The village is one of the indicators in the progress of a country, whether or not a village is progressing depends on how the village funds are managed. Village fund management is something that must be done in the hope that it will develop into an advanced and prosperous area. The large amount of funds managed by the village government has concerns that are no less big, namely the high potential for acts of corruption and the unpreparedness of human resources which result in non-transparent fund management, the large financial potential of village funds. This study aims to determine and analyze the effect of transparency and accountability in managing village funds on community trust in Talang Baru Village, Sidomulyo District, South Lampung Regency.

In this study the research method used is quantitative type of survey research with multiple linear regression analysis. The population and sample in this study were residents of Talang Baru village, Sidomulyo sub-district, South Lampung regency, totaling 70 people using the slovin method and taken using the accidental sampling technique.

The results of this study indicate that the transparency of village fund management has no effect on public trust. Accountability for managing village funds affects public trust. Transparency and accountability in the management of village funds simultaneously affect public trust. In the perspective of sharia accounting, transparency and accountability in the management of village funds for community trust in Talang Baru village are in accordance with Islamic teachings.

Keyword : Transparency, Accountability, Community Trust, Village Fund



**KEMENTRIAN AGAMA
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Alamat : JL. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung 35131, Tlp. (0721) 703289

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Reynaldi Muhammad Gunawan
NPM : 1951030338
Program Studi : Akuntansi Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Terhadap Kepercayaan Masyarakat Ditinjau dalam Perspektif Akuntansi Syariah (Studi di Desa Talang Baru Kecamatan Sidomulyo Kabupaten Lampung Selatan)”** adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusunan sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 22 November 2023

Reynaldi Muhammad Gunawan
NPM.1951030338



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

**Alamat : Jl. Letkol H. Endro Suratmin, Sukarame, Bandar Lampung,
35131 Telp. (0721)703260**

HALAMAN PERSETUJUAN

**Judul Skripsi : Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas
Pengelolaan Dana Desa Terhadap Kepercayaan
Masyarakat Ditinjau dalam Perspektif Akuntansi
Syariah (Studi di Desa Talang Baru Kecamatan
Sidomulyo Kabupaten Lampung Selatan)**

Nama : Reynaldi Muhammad Gunawan

NPM : 1951030338

Prodi : Akuntansi Syariah

Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis Islam

MENYETUJUI

Untuk Dimunaqasahkan dan Dipertahankan dalam siding Munaqasah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Pembimbing II

**Any Eliza, S.E., M.Ak
NIP. 198308152006042004**

**Agus Kurniawan, S.E., M.S.Ak
NIP. 2014080919761226103**

Mengetahui

Ketua Program Studi Akuntansi Syariah

**A. Zuliansyah, M.M.
NIP. 198302222009121003**



**KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Alamat: Jl. Letkol H. Endro Suratmih Sukarame Bandar Lampung 35131. Tlp. (0721) 703289

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **“Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Terhadap Kepercayaan Masyarakat Ditinjau dalam Perspektif Akuntansi Syariah (Studi di Desa Talang Baru Kecamatan Sidomulyo Kabupaten Lampung Selatan).”** Disusun oleh **Reynaldi Muhammad Gunawan, NPM 1951030338, Program Studi Akuntansi Syariah** telah diujikan dalam sidang Munaqosah di **Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung** pada Kamis, 22 November 2023.

TIM PENGUJI

Ketua : **Dr. Asriani, S.H., M.H.**

Sekretaris : **Zathu Restie Utami, M.Pd.**

Penguji I : **Rahmat Fajar Ramdani, S.E., M.St.**

Penguji II : **Any Eliza, S.E., M.Ak.**

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Prof. Dr. Tulus Suryanto, S.E., M.M., Akt., C.A.

NIP. 197009262008011008

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمْنِكُمْ
وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ.

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui.”
(Q.S Al-Anfal : 27)



PERSEMBAHAN

Alhamdulillah robbil'alamin, dengan mengucap puji syukur kepada Allah SWT., Nabi Muhammad SAW., karena atas karunia rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Teriring doa, rasa syukur, dan segala kerendahan hati. Dengan segala cinta dan kasih sayang, ku persembahkan karya tulis ilmiah ini untuk:

1. Ayahanda Teguh Darmawan dan Ibunda tercinta Solawati yang telah mendukung penuh dengan keikhlasan dan ketulusan hati. Terimakasih atas segala doa dan materi yang diberikan serta motivasi untuk terus berjuang untuk hidup yang lebih baik dan lebih berguna bagi bangsa dan negara. Semoga anak mu ini mampu berkarir menjadi seseorang yang dapat kalian banggakan dan bermanfaat untuk lingkungan sekitar.
2. Kepada keluarga dan sanak saudara yang telah mensupport dan memberi masukan serta mendukung dalam menyelesaikan studi S1 di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Semoga Allah membalas kebaikan kalian yang tak dapat terhitung banyaknya.
3. Almamater tercinta UIN Raden Intan Lampung yang telah menjadi wadah dalam menimba ilmu perkuliahan dan tempat berproses untuk menjadi seseorang yang berintelektual.

RIWAYAT HIDUP

Reynaldi Muhammad Gunawan dilahirkan di Tanjung Karang, Kota Bandar Lampung, pada tanggal 06 April 2000 sebagai anak kedua dari empat bersaudara, buah hati dari pasangan Bapak Teguh Darmawan dan Ibu Solawati. Penulis menyelesaikan Sekolah di Taman Kanak-Kanak (TK) Al-Amin Tangerang pada tahun 2006, Sekolah Dasar Negeri (SDN) 01 Talang Baru pada tahun 2012, Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 01 Sidomulyo pada tahun 2015, Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 01 Sidomulyo pada tahun 2018, Penulis tercatat sebagai mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Program Studi Akuntansi Syariah UIN Raden Intan Lampung pada tahun 2019. Selama mengikuti perkuliahan, penulis aktif dalam organisasi kampus yaitu UKM-U Olahraga Raden Intan (ORI) di divisi Bola Basket dan UKM-F RiseF serta tergabung dalam organisasi eksternal kampus yaitu Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), dan pada bulan September - Desember 2022 penulis melaksanakan kegiatan Magang di Kantor Dinas Perhubungan Provinsi Lampung.



Bandar Lampung, November 2023
Yang Membuat,

Reynaldi Muhammad Gunawan
1951030338

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT. Kita memujinya, dan meminta pertolongan pengampunan serta petunjuk kepada-Nya. Kita berlindung kepada Allah SWT. Dari kejahatan diri kita dan keburukan amal kita, sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Terhadap Kepercayaan Masyarakat Ditinjau dalam Perspektif Akuntansi Syariah (Studi di Desa Talang Baru Kecamatan Sidomulyo Kabupaten Lampung Selatan)”** sebagai salah satu syarat untuk menggapai gelar sarjana di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Skripsi ini merupakan salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi pada program S1 jurusan Akuntansi Syariah di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung guna mendapatkan gelar S.Akun. Penulis menyadari dalam penulisan Skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan, bantuan, petunjuk dan saran dari berbagai pihak. Pada kesempatan kali ini, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada :

1. Prof. Wan Jamaludin, Phd, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
2. Prof. Dr, Tulus Suryanto, S.E., M.M., Akt, CA. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
3. A. Zuliansyah, S.Si., M.M. selaku Ketua Jurusan Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
4. Any Eliza, S.E., M.Ak selaku pembimbing Akademik I yang selalu memberikan masukan dan koreksi selama perkuliahan di Jurusan Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
5. Agus Kurniawan, S.E., M.S.Ak. selaku Pembimbing Akademik II yang selalu mengarahkan dan memberi pencerahan dalam mengerjakan skripsi di Jurusan Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

6. Sege nap Bapak/Ibu Dosen dan Seluruh Staf Tata Usaha Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung
7. Keluarga di rumah yaitu Bapak Teguh Darmawan, Ibu Solawati, Kakak Reki Akbar Maulana, Adik Mutiara Salbilla dan Adam Fajri.
8. Teman – teman seperjuangan Akuntansi Syariah angkatan 2019 terkhusus teman – teman dari kelas A yang selalu mendukung dan memberi masukan selama perkuliahan.
9. Teman – teman dari UKM ORI Divisi Basket yang selalu sabar dalam memberi arahan dan masukan selama mengikuti kegiatan UKM.
10. Teman – teman KKN-DR Desa Talang Baru Kecamatan Sidomulyo Kabupaten Lampung Selatan yang selalu memberikan dukungan dan semangat.
11. Kampus UIN Raden Intan Lampung yang tercinta dan selalu dibanggakan yang telah memberikan wadah dan fasilitas untuk meningkatkan kualitas diri
12. Kepada semua pihak yang ikut membantu dalam menyelesaikan studi di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
13. Dan kepada diri sendiri yang sudah mampu menghadapi dan melewati segala rintangan dan cobaan demi mendapatkan gelar sarjana akuntansi

Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini, maka dari itu segala kritik dan saran yang bersifat membangun penulis sangat harapkan guna memperbaiki karya tulis ilmiah selanjutnya. Akhir kata saya ucapkan Terima Kasih yang sebanyak – banyaknya.

Bandar Lampung, 23 November 2023
Penulis,

Reynaldi Muhammad Gunawan
NPM. 1951030338

DAFTAR ISI

COVER	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
ABSTRAK.....	iii
<i>ABSTRACT</i>	iv
SURAT PERNYATAAN	v
PERSETUJUAN.....	vi
PENGESAHAN	vii
MOTTO.....	viii
PERSEMBAHAN.....	ix
RIWAYAT HIDUP	x
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR TABEL.....	xvi
DAFTAR GAMBAR.....	xvii
DAFTAR LAMPIRAN	xviii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah.....	4
C. Identifikasi dan Batasan Masalah.....	14
D. Rumusan Masalah	15
E. Tujuan Penelitian.....	15
F. Manfaat Penelitian.....	16
G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan	17
H. Sistematika Penulisan.....	24

BAB II LANDASAN TEORI DAN PENGAJUAN HIPOTESIS. 25

A. Teori yang Digunakan.....	25
1. <i>Stewardship Theory</i>	25
2. <i>Agency Theory</i>	28
3. Transparansi.....	30
4. Akuntabilitas.....	36
5. Pengelolaan Dana Desa.....	42
6. Kepercayaan Masyarakat.....	45
B. Kerangka Pemikiran.....	46
C. Pengajuan Hipotesis.....	47

BAB III METODE PENELITIAN 51

A. Waktu dan Tempat Penelitian.....	51
B. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	51
C. Populasi, Sampel, dan Teknik Pengumpulan Data.....	52
D. Definisi Operasional Variabel.....	56
E. Instrument Penelitian.....	59
F. Uji Validitas dan Reliabilitas.....	60
G. Uji Prasarat Analisis.....	60
H. Uji Hipotesis.....	62

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 65

A. Deskripsi Data.....	65
1. Gambaran Umum Desa Talang Baru.....	65
2. Struktur Organisasi Desa Talang Baru.....	66
3. Deskripsi Responden.....	67
4. Pengujian Validitas dan Reliabilitas.....	68
5. Pengujian Prasarat Analisis.....	71
6. Uji Hipotesis.....	77
B. Pembahasan Hasil Penelitian dan Analisis.....	82
1. Pengaruh Transparansi Pengelolaan Dana Desa Terhadap Kepercayaan Masyarakat.....	82
2. Pengaruh Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Terhadap Kepercayaan Masyarakat.....	84

3. Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Terhadap Kepercayaan Masyarakat	85
4. Perspektif Akuntansi Syariah tentang Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa	86
BAB V PENUTUP	89
A. Simpulan.....	89
B. Rekomendasi	90
DAFTAR RUJUKAN.....	93
LAMPIRAN.....	101



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Data Dana Desa Talang Baru Th. 2019 s.d 2022	12
Table 3.2 Alternatif Jawaban menurut Skala Likert.....	55
Table 3.3 Tabel Operasional Variabel.....	58
Table 4.4 Struktur Organisasi Desa.....	66
Table 4.5 Data Responden berdasarkan Jenis Kelamin.....	67
Tabel 4.6 Data Responden berdasarkan Usia.....	68
Tabel 4.7 Hasil Uji Validitas Variabel X1	69
Table 4.8 Hasil Uji Validitas Variabel X2	69
Table 4.9 Hasil Uji Validitas Variabel Y	70
Tabel 4.10 Hasil Uji Reliabilitas Variabel X dan Variabel Y	71
Tabel 4.11 Analisis Statistik Deskriptif.....	72
Tabel 4.12 Rata – rata nilai kuesioner X1	72
Tabel 4.13 Rata – rata nilai kuesioner X2	73
Tabel 4.14 Rata – rata nilai kuesioner Y.....	74
Tabel 4.15 Uji Multikolinieritas	74
Tabel 4.16 Analisis Regresi Linier Berganda.....	76
Tabel 4.17 Uji Koefisien Determinasi.....	77
Tabel 4.18 Uji Statistik F	78
Tabel 4.19 Uji Statistik T	79

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Grafik Jumlah Anggaran Dana Desa.....	9
Gambar 2.2 Kerangka Pemikiran.....	47
Gambar 3.3 Laporan Realisasi Anggaran Desa.....	56
Gambar 4.4 Uji Normalitas Data.....	73
Gambar 4.5 Uji Heteroskedastisitas.....	75



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Permohonan Izin Pra Riset	102
Lampiran 2 Surat Balasan Izin Riset.....	103
Lampiran 3 Kuesioner Penelitian	104
Lampiran 4 Daftar Peserta Kuesioner Penelitian	105
Lampiran 5 Tabulasi Data Kuesioner.....	106
Lampiran 6 Rata-rata Nilai Kuesioner	117
Lampiran 7 Daftar Pertanyaan Kuesioner	118
Lampiran 8 Laporan Realisasi Anggaran Desa.....	119
Lampiran 9 Uji Validitas SPSS	120
Lampiran 10 Uji Reliabilitas SPSS	124
Lampiran 11 Analisis Statistik Deskriptif.....	126
Lampiran 12 Uji T Parsial.....	129
Lampiran 13 Uji F Simultan.....	130

BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Berdasarkan judul skripsi yang akan disajikan oleh penulis yang berjudul **“PENGARUH TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA TERHADAP KEPERCAYAAN MASYARAKAT DITINJAU DALAM PERSPEKTIF AKUNTANSI SYARIAH (Studi di Desa Talang Baru Kecamatan Sidomulyo Kabupaten Lampung Selatan)”** maka dari itu sebelum kepembahasan lebih lanjut penulis mempertegas istilah-istilah judul di atas secara rinci sebagai langkah awal penelitian dan juga agar dapat dengan mudah dimengerti dan dipahami serta tidak terjadi kesalahpahaman dalam membaca oleh pembaca.

1. Pengaruh

Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, “Pengaruh adalah daya yang timbul dari sesuatu (orang atau benda) yang bisa membentuk watak, kepercayaan, atau perbuatan seseorang”¹. Pengaruh merupakan suatu keadaan dimana ada hubungan timbal balik antara yang mempengaruhi dan yang dipengaruhi.

2. Transparansi

Transparansi adalah memberikan informasi yang terbuka dan jujur kepada masyarakat dengan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk melihat dan mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban

¹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, edisi keempat, (Jakarta : PN. Balai Pustaka, 1984), 731.

dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.²

3. Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah suatu kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan misi organisasi baik itu keberhasilan maupun kegagalannya dalam mencapai hasil yang telah ditetapkan sebelumnya, yang dilaporkan secara berkala dengan media pertanggungjawaban³. Prinsip Akuntabilitas merupakan bentuk kewajiban lembaga untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangannya.

4. Pengelolaan

Pengelolaan adalah kegiatan bekerja sama atau melalui orang lain baik perorangan maupun kelompok untuk mencapai tujuan organisasi.⁴ Pengelolaan menghasilkan sesuatu yang dapat merupakan sumber penyempurnaan dan peningkatan pengelolaan.

5. Dana Desa

Menurut Undang-Undang Desa, “Dana Desa didefinisikan sebagai dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukan bagi Desa yang ditransfer melalui APBD Kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan, kemasyarakatan dan

² Salle, Agustinus, “Makna transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah, *Jurnal kajian ekonomi dan keuangan daerah*, 2016, 4.

³ Imawan, Amrizal, Gugus Irianto, and Yency Widya Prihatiningtias, “Peran akuntabilitas pemerintah desa dalam membangun kepercayaan publik,” *Jurnal Akuntansi Multiparadigma* 10.1 (2019): 156-175.

⁴ Sudjana, *Strategi Pengelolaan dan Pengembangan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat*, (Jakarta: Depdiknas, 2003),1.

pemberdayaan masyarakat”⁵. Dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, tujuan disalurkannya dana desa adalah sebagai bentuk komitmen negara dalam melindungi dan memberdayakan desa agar menjadi kuat, maju, mandiri dan demokratis. Dengan adanya Dana Desa, desa dapat menciptakan pembangunan dan pemberdayaan desa menuju masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera.

6. Kepercayaan

Kepercayaan adalah mengakui kejujuran serta kemampuan seseorang dan dapat memenuhi ekspektasi. Dengan demikian, kepercayaan adalah keyakinan terhadap seseorang untuk menduduki jabatan tertentu karena dipercaya dapat memiliki kemampuan dan kejujuran dalam menjalankan jabatan tersebut sehingga benar-benar dapat memenuhi harapan.⁶

7. Akuntansi Syariah

Akuntansi Syariah adalah kegiatan identifikasi, klarifikasi, dan pelaporan dalam membuat keputusan ekonomi berdasarkan prinsip akad-akad syariah yang tidak mengandung *zhulum* (kezaliman), *riba*, *maysir* (judi), *gharar* (penipuan), barang yang haram, dan membahayakan.⁷ Akuntansi syariah dapat diartikan sebagai proses akuntansi atas transaksi-transaksi sesuai aturan yang telah ditetapkan oleh Allah swt. Informasi yang diberikan untuk pengguna laporan lebih luas tidak hanya data finansial tetapi juga mencakup aktivitas perusahaan yang berjalan sesuai dengan prinsip syariah.

⁵ Flambonita, Suci, et al, “PENGELOLAAN DAN INFORMASI PERENCANAAN ANGGARAN DESA”, *Jurnal Pendidikan dan Pengabdian Masyarakat* 5.4 (2022), 378-394.

⁶ Hamdiah, Enis Nur, “Pengaruh Kompensasi Finansial, Kompensasi Non Finansial Internal dan Kompensasi Non Finansial Eksternal Terhadap Kinerja Karyawan (Studi Kasus PT. Perkebunan Kopi Kandangan)”, *SIMBA: Seminar Inovasi Manajemen, Bisnis, dan Akuntansi*, Vol. 4.(2022).

⁷ Khadaffi, M., Siregar, S., Noch, M. Y., Nurlaila, N., Harmain, H., & Sumartono, *Akuntansi Syariah*, (Medan: MADENATERA, 2016), 13.

Berdasarkan penjelasan diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa penulis ingin meneliti tentang Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa terhadap Kepercayaan Masyarakat ditinjau dalam Persepektif Akuntansi Syariah di Desa Talang Baru Kecamatan Sidomulyo Kabupaten Lampung Selatan.

B. Latar Belakang Masalah

Akuntansi merupakan suatu bidang keilmuan yang berkembang pesat khususnya pada sektor pemerintahan sebagai alat pencatatan keuangan. Karena tuntutan transparansi dan akuntabilitas pencatatan transaksi dan pelaporan kinerja terhadap pihak yang mempunyai kepentingan menjadikan akuntansi pemerintahan suatu kebutuhan dalam proses pengelolaan keuangan. Akuntansi Pemerintahan dapat diartikan sebagai suatu kegiatan pemberian jasa untuk menyediakan informasi keuangan pemerintah berdasarkan pada pencatatan, pengklasifikasian, pengikhtisaran, suatu transaksi keuangan pemerintah serta penafsiran atas informasi keuangan. Akuntansi Pemerintahan secara khusus memiliki tujuan yaitu Akuntabilitas, Manajerial, dan Pengawasan.⁸ Semakin besar nominal dana yang dikelola oleh pemerintah maka semakin besar pula tuntutan akuntabilitas keuangan sebagai bentuk transparansi keuangan dalam pemerintahan. Jika mengacu pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan maka Akuntansi adalah proses identifikasi, pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian, pengikhtisaran transaksi dan kejadian keuangan, penyajian laporan, serta penginterpretasian atas hasilnya.⁹

Desa adalah salah satu indikator dalam kemajuan sebuah Negara, maju atau tidaknya suatu desa salah satunya tergantung

⁸ Hasanah, N., & Fauzi, *Akuntansi pemerintahan*, (Bogor: In Media 2017), 2.

⁹ Ismail, Muhammad, Ari Kuncara Widagdo, and Agus Widodo, "Sistem akuntansi pengelolaan dana desa", *Jurnal ekonomi dan bisnis* 19.2 (2016), 323-340.

dari bagaimana cara pengelolaan dana desa yang diberikan. Akuntansi desa mempunyai peran penting dalam melakukan pengelolaan keuangan desa karena pada dasarnya memiliki prinsip transparansi dan akuntabilitas. Adanya transparansi pengelolaan dana desa mampu membuat penyimpangan, penyelewengan serta tindakan korupsi diminimalisir karena masyarakat dapat melihat dan memantau terkait pengelolaan dana desa. Transparansi merupakan salah satu unsur utama dalam pengelolaan keuangan, dengan adanya transparansi kebijakan dan keputusan di dalam lembaga pemerintahan berarti pengungkapan untuk hal – hal yang bersifat material secara berkala kepada pihak-pihak yang mempunyai kepentingan yang dalam hal ini adalah masyarakat setempat untuk mendapat informasi mengenai keuangan desa. Prinsip-prinsip Transparansi diukur dengan menggunakan (1) system yang menjamin keterbukaan dan standarisasi dari seluruh proses-proses pelayanan masyarakat; (2) Mekanisme yang memfasilitasi pertanyaan-pertanyaan mengenai berbagai kebijakan dan pelayanan publik, dan juga proses-proses yang ada didalam sektor publik; (3) Mekanisme yang memfasilitasi pelaporan maupun penyebaran informasi maupun penyimpangan tindakan yang dilakukan aparat desa dalam kegiatan melayani¹⁰. Transparansi dapat menjamin setiap orang dapat memperoleh dan mengakses informasi tentang penyelenggaraan pemerintah termasuk informasi pengelolaan dana desa.

Akuntabilitas pengelolaan dana desa merupakan kewajiban dalam melaporkan dan mempertanggungjawabkan dana desa kepada pemerintah kabupaten/kota dan kepada masyarakat atas perencanaan, pelaksanaan, dan penatausahaan. Keberhasilan atau kegagalan akuntabilitas keuangan atas tata kelola dana desa oleh pemerintah desa diukur dari kepatuhan dan ketaatan terhadap asas partisipatif, akuntabel, transparan,

¹⁰ Sugeng Hanifah, Suci Indah & Praptoyo, 'Akuntabilitas Dan Transparansi Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes)', *Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi*, 4.8 (2015), 1–15.

tertib, dan disiplin¹¹. Akuntabilitas menjadi alat untuk meningkatkan kepercayaan dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa. Akuntabilitas dalam persepektif akuntansi Syariah tercantum di dalam Q.S An-nissa ayat 58 yang berbunyi :

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ
النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا
بَصِيرًا ﴾

Artinya : Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat.

Dalam ayat diatas menjelaskan bahwa seseorang yang diberikan amanah wajib menyampaikan amanah tersebut ke orang yang berhak menerimanya. Sementara akuntabilitas secara umum merupakan pertanggungjawaban atas amanah yang diberikan. Maka dari itu seorang yang menyampaikan amanah tersebut harus bertanggung jawab secara penuh pada setiap tugas yang diberikan baik kepada Allah maupun kepada manusia. Salah satu upaya penerapan transparansi dan akuntabilitas pemerintah desa melakukan pemasangan pengumuman anggaran dan realisasi anggaran di kantor balai desa sehingga masyarakat dapat melihat kemana saja dana diprogramkan

Desa merupakan tingkat pemerintahan paling bawah yang berinteraksi langsung dengan masyarakat meski begitu pemerintahan desa memiliki peran penting dalam kemajuan

¹¹ Imawan, 'Peran akuntabilitas pemerintah desa dalam membangun kepercayaan publik', 9.

pembangunan di Indonesia sehingga tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah atas pengelolaan dana desa merupakan sesuatu yang sangat krusial. Berkaitan dengan hal tersebut maka pemerintah mengatur dalam UU No.6 tahun 2014 tentang desa yang menjelaskan bahwa desa merupakan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara kesatuan republik indonesia. Dalam UU tersebut juga menyampaikan bahwa tujuan disalurkannya dana desa adalah sebagai bentuk komitmen negara dalam melindungi dan memberdayakan desa agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga menciptakan pembangunan dan pemberdayaan desa yang adil, makmur, dan sejahtera. Pembangunan desa menjadi bagian yang sangat penting dan strategis dalam rangka menciptakan pembangunan nasional dan daerah berdasarkan visi dan misi pemerintah pusat dan pemerintah daerah karena di dalamnya terdapat unsur pemerataan pembangunan dan hasilnya serta menyentuh secara langsung kepentingan masyarakat sekitar dipedesaan demi mewujudkan upaya memberantas kemiskinan masyarakat¹². Desa juga diharapkan mampu menjalankan mandat dan penugasan dibebberapa urusan yang ditugaskan pemerintah provinsi, dan yang terutama pemerintah kabupaten/kota yang berada di atasnya, dan dapat menjadi ujung tombak dalam setiap pelaksanaan kegiatan pembangunan dan kemasyarakatan, hal ini dimaksudkan untuk mempersiapkan desa dalam menghadapi proses perkembangan zaman yang terus berkembang tanpa kehilangan jati dirinya.¹³

Akuntansi dapat digunakan untuk memberikan acuan pengelolaan Dana Desa yang diharapkan bisa membuat sebuah

¹² Yamulia Hulu and others, 'Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial Pengelolaan Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa', 10.1 (2018), 146–54 <<http://jurnal.unimed.ac.id/2012/index.php/jupiiis>>.

¹³ Ismail, 'Sistem akuntansi pengelolaan dana desa', 7.

kualitas serta akuntabilitas dalam mengelola secara transparansi dan bisa bertanggung jawab terhadap masyarakat. Akuntansi yang menjadi dasar sebagai pengelolaan keuangan desa memberikan pedoman kepada pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan desa secara transparan, akuntabel, partisipatif serta tertib dan disiplin.¹⁴ Hal ini berarti pemerintah desa wajib untuk memberikan bukan hanya sekedar informasi yang transparan namun juga harus mempertanggungjawabkan hasil kerjanya kepada masyarakat secara terus menerus dan mudah diakses. Maka dari itu sistem akuntansi dapat membantu dalam pengelolaan, perencanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban dana desa. Hal ini mengacu pada Peraturan Presiden No 60 Tentang Dana Desa pasal 2 berbunyi Dana Desa dikelola secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat.¹⁵ Dan juga Peraturan Menteri dalam Negeri No 113 Tahun 2014 tentang pedoman pengelolaan keuangan desa pada bab II pasal 2 yaitu (1) Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran, (2) Pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.¹⁶

Pengelolaan dana desa merupakan sesuatu yang harus dilakukan dengan harapan dapat berkembang menjadi daerah yang maju dan sejahtera. maka diharapkan bisa menjadi acuan dalam mengelola desa karena didalamnya sudah mencakup

¹⁴ Riyanto, A., Suherman, A., & Prayudi, D, 'Akuntansi Dalam Perspektif Pengelolaan Keuangan Desa', *Seminar Nasional Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi Komputer* (2016).

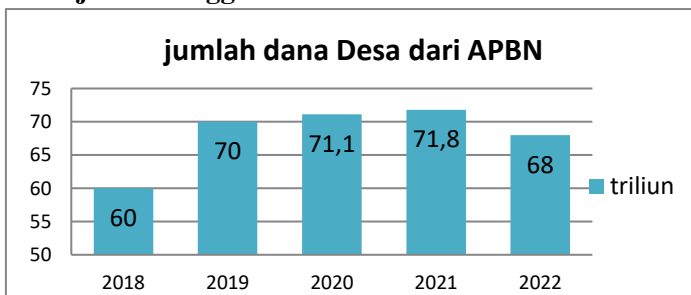
¹⁵ Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014, 'Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari APBN', 2014, pp. 1-8.

¹⁶ Peraturan KEMENDAGRI Nomor 113 Tahun 2014, 'Peraturan Menteri dalam Negeri No 113 Tahun 2014 tentang pedoman pengelolaan keuangan desa ', 2014.

berbagai prosedur pengelolaan keuangan desa mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan sampai dengan pertanggung jawaban. Pemanfaatan dana desa diprioritaskan pada pembangunan dasar yang dikatakan masih belum optimal seperti pengembangan pos kesehatan desa dan polindes, pengelolaan dan pembinaan posyandu, dan pembinaan dan pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)¹⁷, tidak hanya itu dana Desa diharapkan tidak hanya mampu menggerakkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan, tetapi juga mampu menyelenggarakan pelayanan administrasi desa dengan baik serta dapat mengelola keuangan desa dengan baik dan tertib. Apabila pembangunan di setiap desa berhasil secara maksimal dalam memberdayakan masyarakat maka pemerataan pembangunan dan kemakmuran dapat dicapai, oleh karenanya peran pemerintah daerah dalam otonomi daerah sangat penting karena desa berhak secara bebas mengatur kehidupan desa sebelum diatur oleh pemerintah daerah. Untuk mendanai program pembangunan di tiap desa memerlukan biaya yang tidak sedikit dan tidak mudah dalam mengelolanya. Setiap tahunnya jumlah dana desa dari pemerintah pusat selalu bertambah setiap tahunnya seperti yang bisa kita lihat pada gambar grafik dibawah ini.

Gambar 1.1

Grafik jumlah anggaran dana desa dalam 5 tahun terakhir



Sumber : <https://djjpb.kemenkeu.go.id> (Data diolah)

¹⁷ Flambonita, 'PENGELOLAAN DAN INFORMASI PERENCANAAN ANGGARAN DESA', 9.

Dibalik besarnya dana yang dikelola desa dan harapan untuk mewujudkan pemerataan pembangunan desa, juga terdapat kekhawatiran yang tak kalah besarnya, yaitu tingginya potensi terjadinya tindakan korupsi dan ketidaksiapan Sumber Daya Manusia yang akan mengakibatkan pengelolaan dana tidak transparan, potensi finansial dana desa yang besar, jika tidak disertai transparansi maka berpotensi terjadi penyimpangan apalagi ada saja oknum yang seharusnya menjadi kepercayaan masyarakat dalam membangun dan memajukan desa tergiur dengan dana yang diberikan. Banyak kasus yang sudah terjadi contohnya seperti yang di rilis oleh Kupastuntas.co.id di desa karya tunggal kecamatan katibung lampung selatan yang diduga melakukan korupsi sebesar Rp824.464.363 dari 2016 sampai 2019¹⁸. Faktor penyebab terjadinya korupsi dana desa yang paling mendasar adalah kurangnya keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan dan pengawasan dana desa, keterlibatan masyarakat ini menjadi dasar karena masyarakatlah yang mengetahui kebutuhan pembangunan desa. Faktor yang kedua adalah kualitas SDM kepala desa dan jajarannya, hal ini menyangkut teknis pengelolaan dana desa dan pertanggungjawaban. Faktor yang ketiga kurangnya peran lembaga-lembaga desa dalam pemberdayaan masyarakat seperti Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan lainnya. Faktor keempat adalah *cost* politik yang besar karena ketatnya persaingan pemilihan kepala desa. Besarnya jumlah dana yang di anggarkan pemerintah pusat maka diperlukannya pengawasan dan pertanggungjawaban penuh dari pihak desa. Kompetensi aparatur desa dan regulasi yang relatif cukup baru diduga terdapat cukup banyak penyelewengan dalam tiap pengelolaan dana desa, mulai dari proses perencanaan hingga monitoring dan evaluasi. Disini lah kita sebagai masyarakat berperan mengawasi dan memberikan dukungan terhadap

¹⁸ Imanuel, 'Diduga Korupsi Dana Desa Ratusan Juta, Kejari Lamsel Tahan Kepala Desa Karya Tunggal', *Kupastuntas.Co*, 2020 <<https://kupastuntas.co/2022/05/23/diduga-korupsi-dana-desa-ratusan-juta-kejari-lamsel-tahan-kepala-desa-karya-tunggal>> [accessed 20 December 2022].

pemerintah dalam upaya pembangunan yang bersifat berkelanjutan. Jumlah Dana Desa yang dianggarkan oleh pemerintah ke tiap – tiap provinsi mengalami peningkatan tiap tahunnya. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa diperkirakan cukup besar dan bervariasi dengan dana yang hampir mencapai satu milyar per desa tergantung dengan kondisi dan kebutuhan desa tersebut.¹⁹

Dalam melakukan pengelolaan dana desa ditujukan untuk memenuhi syarat–syarat tata kelola yang baik (*Good Governance*). *Good Governance* adalah salah satu aspek yang dapat berperan dalam tingkat kesejahteraan apabila dipraktikkan dalam kebijakan publik. Salah satu komponen *good governance* adalah sikap transparansi atau keterbukaan yang dimana prinsip ini bisa menciptakan kepercayaan antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan dan kemudahan akses informasi²⁰. Dalam penerapannya untuk mencapai *Good Governance* diperlukan aparat yang paham akan tugas dan fungsinya aparatur pemerintah desa, hal tersebut sangat penting karena merupakan faktor pendukung dalam pengimplementasian kebijakan otonomi daerah pada tingkat pemerintahan desa sehingga dapat disimpulkan bahwa aparatur desa memiliki peran penting dalam pelaksanaan dan pengelolaan dana desa. Anggaran desa yang cukup besar tentunya akan membutuhkan pengelolaan yang baik. Hal ini dimaksudkan agar tujuan dari peraturan perundang–undangan tentang kesejahteraan masyarakat desa dapat terwujud. Mengingat bahwa dalam hal pengelolaan dana desa, tidak menutup kemungkinan risiko terjadinya kesalahan baik bersifat administratif maupun substantif yang dapat mengakibatkan permasalahan hukum karena belum memadainya kepala desa dan aparatur desa dalam hal penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban

¹⁹ Ismail, 'Sistem akuntansi pengelolaan dana desa', 15.

²⁰ Dewi Kusuma Wardani and Ratih Ranika Putri Utami, 'Pengaruh Transparansi Pengelolaan Keuangan Dana Desa Dan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Desa Sidoharjo', *Kajian Bisnis STIE Widya Wiwaha*, 28.1 (2020), 35–50 <<https://doi.org/10.32477/jkb.v28i1.376>>.

keuangan desa. Peran akuntansi dalam pengelolaan dana desa adalah untuk membantu dalam penyusunan laporan keuangan yang dapat dipercaya dan transparan untuk mencapai *Good Governance*. Dalam rangka mewujudkan tata kelola yang baik (*good governance*) dalam penyelenggaraan desa, pengelolaan keuangan desa dilakukan berdasarkan prinsip tata kelola yaitu transparan, akuntabel dan partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran²¹.

Desa Talang baru merupakan desa yang terletak di kecamatan Sidomulyo Kabupaten Lampung Selatan yang untuk saat ini dipimpin oleh Ahmadi selaku Kepala Desa dan memiliki jumlah kepadatan populasi 2.216 yang terdiri dari 1.182 laki laki dan 1.034. Secara geografis desa ini memiliki luas wilayah 1.372 KM dengan memiliki 5 dusun. Mayoritas penduduknya berprofesi sebagai petani, peternak dan karyawan swasta. Dalam 5 tahun terakhir perkembangan desa talang baru dirasa cukup signifikan dengan banyak melakukan pembangunan – pembangunan yang bersifat pokok seperti pembangunan jembatan dan pengecoran akses jalan, lalu juga pembangunan PAUD serta pengeboran sumur untuk mendapatkan air bersih di tiap – tiap dusun. Tidak hanya itu desa talang baru juga membuat program seragam dan alat tulis gratis kepada anak anak yang sedang menempuh pendidikan sekolah dasar, hal ini dilakukan agar anak anak di desa dapat menyenangi bangku pendidikan.

Tabel 1.1
Data Dana Desa Talang Baru Th. 2019 s.d 2022

No	Tahun	Jumlah Dana
1	2019	Rp 1.134.514.820
2	2020	Rp 979.303.000
3	2021	Rp 951.524.000
4	2022	Rp 867.883.000

Sumber : www.siskeudes.com (data diolah)

²¹Ade Setiawan, 'Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Mewujudkan Good Governance', *Prosiding Seminar Nasional Akuntansi Dan Manajemen (SENAMA)*, 1.1 (2022), 169 <<https://doi.org/10.52353/senama.v1i1.242>>.

Berdasarkan informasi yang didapatkan dari Ardi selaku staf keuangan di desa talang baru, dalam melakukan pengelolaan dana desa pada tahun 2022 desa Talang Baru mendapatkan dana sebesar Rp 867.883.000 yang telah di programkan ke pembangunan jalan usaha tani dan bantuan hewani ternak sebesar 20%, Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLTDD) sebesar 40%, Penanganan covid 8%, lalu pemberian intensif ke guru - guru ngaji, tenaga kesehatan desa, tenaga pengajar di PAUD, linmas dan bantuan seragam serta ATK sekolah dasar sebesar 32%. Lalu pada tahun sebelumnya yaitu 2021 desa talang baru mendapatkan dana sebesar Rp 951.524.000 yang telah direalisasikan pada program bidang pertanian dan peternakan 40%, bidang pendidikan dan kesehatan 8%, bidang pekerjaan umum dan penataan ruang 25%, penanggulangan bencana 10%, bidang peningkatan kapasitas aparatur desa 6%, dan bidang penyelenggaraan pemerintah desa 11%²². Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada salah satu warga desa talang baru bernama Rino yang menyatakan bahwa masih ada keraguan terhadap pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa dikarenakan minimnya keterlibatan masyarakat dalam program pemanfaatan dana desa serta kurangnya SDM dalam menjalankan BUMDes juga menjadi salah satu faktor yang membuat hal ini berdampak pada kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan desa dan pemerintah desa juga masih belum bisa mengatasi masalah banjir di salah satu dusun desa talang baru kecamatan sidomulyo kabupaten lampung selatan²³. Dan peneliti juga melakukan wawancara kepada Kepala Desa Talang Baru Ahmadi menyatakan bahwa masih ada keraguan terhadap pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa dikarenakan minimnya pemahaman masyarakat akan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan

²² Ardi, "Program pengalokasian pengelolaan dana desa", *Wawancara*, Januari 03, 2023.

²³ Rino Yahya, "Kinerja pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa", *Wawancara*, Desember 17, 2022.

dana desa serta kurang maksimal nya masyarakat memanfaatkan bantuan dana desa yang diberikan²⁴.

C. Identifikasi dan Batasan Masalah

a. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang dipaparkan diatas maka penulis mengidentifikasi beberapa masalah yang ditemukan yaitu :

1. Terdapat kurangnya kepercayaan pada sebagian masyarakat di Desa Talang Baru Kecamatan Sidomulyo Kabupaten Lampung Selatan disebabkan kurangnya pemahaman masyarakat mengenai transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana desa,
2. Pemanfaatan dana desa yang dirasa belum maksimal di beberapa tempat, dan
3. Kurangnya keterlibatan masyarakat dalam program pengelolaan dana desa.

b. Batasan Masalah

Adanya batasan masalah ini agar tidak terjadi pembahasan yang meluas dan tidak terjadi kesalahpahaman. Oleh karena itu penulis memfokuskan penelitiannya hanya berkaitan pada Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Terhadap Kepercayaan Masyarakat ditinjau dalam Persepektif Akuntansi Syariah di Desa Talang Baru Kecamatan Sidomulyo Kabupaten Lampung Selatan.

²⁴ Ahmadi, "Pemahaman Masyarakat tentang Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa". *Wawancara*, Januari 12, 2023.

D. Rumusan Masalah

Dari latar Belakang yang sudah dipaparkan maka peneliti merumuskan masalah penelitian sebagai berikut :

1. Apakah Transparansi pengelolaan dana Desa berpengaruh terhadap kepercayaan masyarakat di Desa Talang Baru Kecamatan Sidomulyo Kabupaten Lampung Selatan?
2. Apakah Akuntabilitas pengelolaan dana Desa berpengaruh terhadap kepercayaan masyarakat di Desa Talang Baru Kecamatan Sidomulyo Kabupaten Lampung Selatan?
3. Apakah Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa berpengaruh Terhadap Kepercayaan Masyarakat di Desa Talang Baru Kecamatan Sidomulyo Kabupaten Lampung Selatan?
4. Bagaimana Persepektif Akuntansi Syariah tentang Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Terhadap Kepercayaan Masyarakat di Desa Talang Baru Kecamatan Sidomulyo Kabupaten Lampung Selatan?

E. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui apakah Transparansi pengelolaan dana Desa berpengaruh terhadap kepercayaan masyarakat di Desa Talang Baru Kecamatan Sidomulyo Kabupaten Lampung Selatan.
2. Untuk mengetahui apakah Akuntabilitas pengelolaan dana Desa berpengaruh terhadap kepercayaan masyarakat di Desa Talang Baru Kecamatan Sidomulyo Kabupaten Lampung Selatan.
3. Untuk mengetahui apakah Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa berpengaruh Terhadap

Kepercayaan Masyarakat di Desa Talang Baru Kecamatan Sidomulyo Kabupaten Lampung Selatan.

4. Untuk mengetahui Bagaimana Persepektif Akuntansi Syariah tentang Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Terhadap Kepercayaan Masyarakat di Desa Talang Baru Kecamatan Sidomulyo Kabupaten Lampung Selatan.

F. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Peneliti berharap penelitian ini dapat menjadi tambahan wawasan ilmu pengetahuan bagi pengemban ilmu akuntansi khususnya akuntansi syariah yang berkaitan dengan Transparansi dan Akuntabilitas khususnya tentang akuntansi pengelolaan dana desa.

2. Manfaat Praktis

a. Manfaat bagi Peneliti

Manfaat untuk peneliti diharapkan dapat memberikan kemampuan untuk dapat mengkritisi suatu fenomena atau kejadian tertentu yang kemudian dituangkan kedalam karya ilmiah melalui proses berpikir secara kritis dan dinamis sebagai wujud pertanggungjawaban selama di bangku perkuliahan serta dapat memberikan manfaat pengetahuan yang lebih luas mengenai transparansi dan akuntabilitas.

b. Manfaat bagi Pengelola Dana Desa

Manfaat untuk Desa Talang Baru diharapkan dapat memberikan masukan dan sumbangan pemikiran mengenai Transparansi dan Akuntabilitas pengelolaan

dana desa serta memperkenalkan desa talang baru kepada para peneliti selanjutnya.

c. Manfaat bagi Peneliti yang akan datang

Manfaat untuk peneliti yang akan datang diharapkan dapat menjadi salah satu referensi penelitian dengan tema yang sama.

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang relevan

Dalam penelitian ini peneliti mengambil beberapa referensi dari penelitian terdahulu sebagai gambaran untuk mempermudah proses penelitian. Penelitian terdahulu yang diambil oleh penulis mengacu pada topik permasalahan yang relevan dan terkait sehingga dapat sejalan dengan proses penelitian yang dilakukan. Berikut adalah beberapa hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya:

1. penelitian yang dilakukan oleh Isna Apriliana pada tahun 2019 yang berjudul “DETERMINAN AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA DAN DAMPAKNYA TERHADAP KEPERCAYAAN MASYARAKAT.” Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh penyajian laporan keuangan, aksesibilitas laporan keuangan dan mekanisme pengawasan terhadap akuntabilitas dan transparansi pengelolaan alokasi dana desa serta dampaknya terhadap kepercayaan masyarakat. hasil penelitian menunjukkan bahwa aksesibilitas laporan keuangan dan mekanisme pengawasan berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa, sedangkan transparansi hanya dipengaruhi secara positif oleh mekanisme pengawasan. Temuan lain penelitian ini menyatakan bahwa akuntabilitas berpengaruh positif terhadap kepercayaan masyarakat, namun transparansi tidak mempengaruhi kepercayaan masyarakat. Hasil penelitian

ini mengindikasikan semakin pengelolaan alokasi dana desa yang akuntabel berperan penting dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat²⁵.

Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Isna Aprilia dengan penelitian ini terletak di tempat penelitian yang berbeda serta pada penelitian ini membahas tentang Pengelolaan Dana Desa sementara penelitian terdahulu membahas tentang Pengelolaan Alokasi Dana Desa.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Lailatus Sa'adah, dan Moh. Syadel pada tahun 2021 yang berjudul "AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI APARATUR DESA DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN PENGARUHNYA TERHADAP TINGKAT KEPERCAYAAN MASYARAKAT MELALUI KUALITAS PELAYANAN (Studi Pada Desa-desa di Kecamatan Dau Kabupaten Malang)". Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh akuntabilitas dan transparansi sebagai variabel independen terhadap tingkat kepercayaan masyarakat sebagai variabel dependen melalui kualitas pelayanan sebagai variabel intervening. Kesimpulan dari penelitian yang dilakukan adalah bahwa ditemukannya pengaruh yang positif dan signifikan antar variabel yang diuji. Penelitian ini dilakukan di desa desa yang berada di Kecamatan Dau, Kabupaten Malang, Jawa Timur²⁶. Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Lailatus Sa'adah dkk dengan penelitian ini terletak di tempat penelitian yang berbeda serta pada penelitian ini membahas

²⁵ Isna Aprilia, 'Determinan Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dan Dampaknya Terhadap Kepercayaan Masyarakat', *Akurasi : Jurnal Studi Akuntansi Dan Keuangan*, 2.2 (2019), 109–22 <<https://doi.org/10.29303/akurasi.v2i2.18>>.

²⁶ Lailatus Sa'adah and Moh Syadeli, 'Akuntabilitas Dan Transparansi Aparatur Desa Dalam Pengelolaan Keuangan Pengaruhnya Terhadap Tingkat Kepercayaan Masyarakat Melalui Kualitas Pelayanan (Studi Pada Desa-Desa Di Kecamatan Dau Kabupaten Malang)', *Jurnal Administrasi Dan Bisnis*, 15.1 (2021), 9–15 <<http://j-adbis.polinema.ac.id/index.php/adbis/article/view/105/104>>.

tentang Pengelolaan Dana Desa sementara penelitian terdahulu membahas tentang Aparatur desa Dalam Pengelolaan Keuangan serta variable Y yang berbeda dengan penelitian terdahulu.

3. Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Hafiez Sofiyani, dan Afrizal Tahar pada tahun 2021 yang berjudul “PERAN AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI PEMERINTAH DESA INDONESIA TERHADAP KEPERCAYAAN MASYARAKAT DESA: KASUS DI KABUPATEN BANTUL”. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh akuntabilitas dan transparansi pemerintahan desa terhadap kepercayaan masyarakat desa. Studi ini menemukan bahwa transparansi meningkatkan kepercayaan masyarakat desa sementara akuntabilitas sebaliknya. Berdasarkan temuan penelitian, transparansi menjadi faktor penting untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap desa²⁷. Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Hafiez dan Afrizal dengan penelitian ini terletak di tempat penelitian yang berbeda.
4. Penelitian yang dilakukan oleh Dewi Kusuma Wardani, dan Ratih Ranika Putri Utami pada tahun 2020 yang berjudul “PENGARUH TRANSPARANSI PENGELOLAAN KEUANGAN DANA DESA DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DESA SIDOHARJO.” Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh transparansi dalam pengelolaan keuangan dana desa dan pemberdayaan masyarakat terhadap kesejahteraan masyarakat di Desa Sidoharjo, Kecamatan Tepus, Kabupaten Gunungkidul. Hasil penelitian ini

²⁷ Hafiez Sofiyani and Afrizal Tahar, ‘Peran Akuntabilitas Dan Transparansi Pemerintah Desa Indonesia Terhadap Kepercayaan Masyarakat Desa: Kasus Di Kabupaten Bantul’, *Jurnal Akademi Akuntansi*, 4.1 (2021), 10–25 <<https://doi.org/10.22219/jaa.v4i1.16481>>.

menunjukkan bahwa pemberdayaan masyarakat berpengaruh positif terhadap kesejahteraan masyarakat Desa Sidoharjo, Kecamatan Tepus Kabupaten Gunungkidul, sedangkan transparansi pengelolaan keuangan desa dana tidak mempengaruhi kesejahteraan masyarakat di Desa Sidoharjo Kecamatan Tepus, Kabupaten Gunungkidul²⁸.

Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Dewi dan Ratih dengan penelitian ini terletak di tempat penelitian yang berbeda serta penelitian terdahulu tidak membahas Akuntabilitas dan variable terikat yang berbeda.

5. Penelitian dilakukan oleh Mandy Tania, dan Titik Mildawati pada tahun 2019 yang berjudul “PENGARUH AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA, TRANSPARANSI, DAN KEBIJAKAN DESA TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT”. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa, transparansi, dan kebijakan desa terhadap kesejahteraan masyarakat studi kasus desa Kletek kabupaten Sidoarjo. Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan penelitian ini menunjukkan bahwa akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa, transparansi, dan kebijakan desa berpengaruh positif terhadap kesejahteraan masyarakat hal ini dibuktikan dalam melaksanakan akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa setiap aliran dana yang masuk dan keluar telah disajikan dalam laporan keuangan yang di susun secara rinci dan dapat dipertanggungjawabkan. Transparansi juga telah dilakukan dengan adanya bukti banner yang terpasang pada halaman depan kantor kelurahan. Kebijakan desa cukup baik dengan membuat kebijakan yang memprioritaskan pembangunan daerah dan kemudian dilaksanakan secara efektif guna

²⁸ Dewi, "Pengaruh Transparansi Pengelolaan Keuangan Dana Desa Dan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Desa Sidoharjo," 15.

meningkatkan sarana dan prasarana dan menanggulangi kemiskinan sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya²⁹.

Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Mandi dan Titik dengan penelitian ini terletak di tempat penelitian yang berbeda serta penelitian ini membahas tentang Kepercayaan Masyarakat sementara penelitian terdahulu membahas tentang Kesejahteraan Masyarakat.

6. Penelitian yang dilakukan oleh Emilianus Jaa, Sulisty pada tahun 2019 yang berjudul “PENGARUH TRANSPARANSI, AKUNTABILITAS, DAN PARTISIPASI MASYARAKAT PADA PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA (ADD) TERHADAP PEMBANGUNAN DESA (Studi Kasus Di Desa Gurung Turi Kabupaten Manggarai Timur)”. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis (1) pengaruh yang signifikan secara simultan transparansi, akuntabilitas dan partisipasi masyarakat pada pengelolaan alokasi dana desa terhadap pembangunan desa. (2) pengaruh yang signifikan secara parsial transparansi pengelolaan alokasi dana desa terhadap pembangunan desa. (3) pengaruh yang signifikan secara parsial akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa terhadap pembangunan desa., (4) pengaruh yang signifikan secara parsial partisipasi masyarakat pada pengelolaan alokasi dana desa terhadap pembangunan desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara keseluruhan variabel transparansi, akuntabilitas dan partisipasi masyarakat pada Pengelolaan Alokasi Dana Desa memiliki pengaruh terhadap Pembangunan Desa. Pelaksanaan prinsip transparansi, akuntabilitas dan partisipasi masyarakat sudah diterapkan. Dengan pelaksanaan ketiga prinsip

²⁹ Mandy Tania Sari and Titik Mildawati, ‘Pengaruh Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa, Transparansi, Dan Kebijakan Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat. Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi. e-ISSN:2460-0585’, *Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 8.12 (2018), 1–17.

transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat memberikan pengaruh terhadap pembangunan desa dengan menunjukkan tingkat pembangunan desa gurun turi yang sudah mulai meningkat³⁰.

Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Emilianus dan Sulistyو dengan penelitian ini terletak di tempat penelitian yang berbeda serta penelitian ini membahas tentang Pengelolaan Dana Desa sementara penelitian terdahulu membahas tentang Pengelolaan Alokasi Dana Desa dan variable terikat yang berbeda yaitu Kepercayaan Masyarakat sementara penelitian terdahulu membahas tentang Pembangunan Desa.

7. Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Christa Yunnita Garung dan Linda Lomi Ga pada tahun 2020 yang berjudul “PENGARUH AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI TERHADAP PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA (ADD) DALAM PENCAPAIAN GOOD GOVERNANCE PADA DESA MANULEA, KECAMATAN SASITAMEAN, KABUPATEN MALAKA”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh akuntabilitas dan transparansi terhadap pengelolaan alokasi dana desa dan menginginkan tata kelola yang baik di Desa Manulea, Kecamatan Sasitamean, Kabupaten Malaka. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas dan transparansi secara parsial berpengaruh signifikan, terhadap pengelolaan alokasi dana desa. Sedangkan akuntabilitas dan transparansi secara simultan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pengelolaan alokasi dana desa dalam mewujudkan pemerintahan yang

³⁰ Emilianus Jaa, Sulistyو Sulistyو, and Supami Wahyu Setiyowati, ‘Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, Dan Partisipasi Masyarakat Pada Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Add) Terhadap Pembangunan Desa’, *Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi*, 7.1 (2020), 1–9 <<https://doi.org/10.21067/jrma.v7i1.4237>>.

baik di Desa Manulea, Kabupaten Sasitamean, Kabupaten Malaka³¹.

Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Christa dan Linda dengan penelitian ini terletak di tempat penelitian yang berbeda serta penelitian ini membahas tentang Pengelolaan Dana Desa sementara penelitian terdahulu membahas tentang Pengelolaan Alokasi Dana Desa.

8. Penelitian yang dilakukan oleh Eni Dwi Susliyanti, dan Enita Binawati pada tahun 2020 yang berjudul “PENGARUH AKUNTABILITAS KEUANGAN DAN AKUNTABILITAS KINERJA TERHADAP KEPERCAYAAN DAN KEPUASAN MASYARAKAT ATAS PENGGUNAAN DANA DESA”. Tujuan dari penelitian ini adalah menguji pengaruh akuntabilitas keuangan dan akuntabilitas kinerja terhadap kepercayaan dan kepuasan masyarakat atas penggunaan Dana Desa. Hasil menunjukkan akuntabilitas keuangan tidak berpengaruh terhadap kepuasan dan kepercayaan masyarakat atas penggunaan dana desa, akuntabilitas kinerja berpengaruh terhadap kepuasan dan kepercayaan masyarakat atas penggunaan dana desa³².

Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Eni dan Enita dengan penelitian ini terletak di tempat penelitian yang berbeda serta penelitian ini membahas tentang Transparansi dan Akuntabilitas sementara penelitian terdahulu hanya membahas Akuntabilitas.

H. Sistematika Penulisan

³¹ Christina Yunnita Garung and Linda Lomi Ga, ‘Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Add) Dalam Pencapaian Good Governance Pada Desa Manulea, Kecamatan Sasitamean, Kabupaten Malaka’, *Jurnal Akuntansi: Transparansi Dan Akuntabilitas*, 8.1 (2020), 19–27 <<https://doi.org/10.35508/jak.v8i1.2363>>.

³² Eni Dwi Susliyanti and Enita Binawati, ‘Pengaruh Akuntabilitas Keuangan Dan Akuntabilitas Kinerja Terhadap Kepercayaan Dan Kepuasan Masyarakat Atas Penggunaan Dana Desa’, *EFEKTIF Jurnal Bisnis Dan Ekonomi*, 11.1 (2020), 1–12.

Sistematika penulisan adalah susunan penulisan dalam sebuah penelitian, dimana antara satu bab dengan bab lainnya memiliki hubungan yang kuat, berikut ini sistematika penulisan dari penelitian ini :

BAB I Pendahuluan, Pada Bab I, penulis menjelaskan penegasan judul, latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan kajian penelitian terdahulu yang relevan.

BAB II Landasan Teori dan Pengajuan Hipotesis, Pada Bab II, penulis akan menjelaskan landasan teori yang digunakan dalam melakukan penelitian ini. Dalam bab ini juga akan mencakup penelitian terdahulu, kerangka pemikiran serta pengajuan hipotesis.

BAB III Metode Penelitian, Pada Bab III, penulis akan menjelaskan waktu dan tempat penelitian, pendekatan dan jenis penelitian, populasi sampel dan teknik pengumpulan data, definisi operasional variabel, instrument penelitian, uji validitas dan reliabilitas data, uji prasarat analisis, dan uji hipotesis.

BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan, Pada Bab IV, penulis menyajikan hasil data yang sudah diolah, dianalisis dan interpretasi data serta membuktikan hipotesis penelitian.

BAB V Penutup, Pada Bab V, penutup ini penulis memberikan kesimpulan dari hasil penelitian yang dilakukan serta saran bagi semua pihak berdasarkan hasil penelitian.

BAB II

LANDASAN TEORI DAN PENGUJIAN HIPOTESIS

A. Teori yang digunakan

1. *Stewardship Theory*

Di dalam buku *Toward a stewardship theory of management* dijelaskan bahwa *Stewardship Theory* adalah teori yang menggambarkan sebagai situasi dimana para manajemen tidak termotivasi oleh kepentingan-kepentingan individu melainkan sasaran hasil utama mereka untuk kepentingan organisasi. Sehingga teori ini mempunyai dasar psikologi dan sosiologi yang telah dirancang dimana para eksekutif sebagai *steward* termotivasi untuk bertindak sesuai keinginan *principal*, selain itu perilaku *steward* tidak akan meninggalkan organisasinya sebab *steward* berusaha mencapai sasaran organisasinya³³. *Stewardship Theory* diasumsikan mengenai sifat manusia yang pada dasarnya dapat di percaya, dapat bertindak penuh tanggung jawab, memiliki integritas dan kejujuran terhadap pihak lain³⁴. *Stewardship* merupakan sebuah pandangan tentang pengelolaan organisasi, bagaimana cara membentuk suatu perilaku dimana seseorang mampu bekerja sama untuk mewujudkan visi suatu organisasi tidak hanya untuk mensejahterakan diri sendiri. Teori ini merupakan salah satu *Grand Theory* yang sering dijadikan sebagai rujukan dalam penelitian bidang keilmuan akuntansi khususnya di organisasi sektor publik baik di pemerintahan maupun organisasi nirlaba. Manajemen organisasi dalam hal ini dituntut untuk dapat memberikan pelayanan yang bertindak

³³ Davis, James H., F. David Schoorman, and Lex Donaldson, 'Toward a stewardship theory of management', *The Academy of Management Review* Vol. 22, No. 1 (Jan., 1997), pp. 20-47.

³⁴Sari, "Pengaruh Akuntabilitas pengelolaan Keuangan Desa, Transparansi, dan Kebijakan Dea Terhadap Kesejahteraan Masyarakat," 10.

sebagai *steward* bagi kepentingan *principal* (masyarakat). Agar menumbuhkan kepercayaan, *steward* sebagai penerima amanah harus memberikan pelayanan yang terbaik, terbuka, dan transparan kepada *principal* sebagai pemberi amanah kepada *steward*. Teori ini dapat diterapkan di akuntansi sektor publik yang menjelaskan bahwa adanya hubungan yang kuat antara kepuasan dan kesuksesan organisasi yang dalam penelitian ini adalah pemerintahan desa.

Di awal perkembangannya, akuntansi organisasi sektor publik telah disiapkan untuk memenuhi kebutuhan informasi bagi hubungan antara pemerintahan dengan masyarakat. Kontrak hubungan antara pemerintahan desa dan masyarakat atas dasar kepercayaan (amanah = *trust*) dan keterbukaan (transparansi) bertindak kolektif sesuai dengan tujuan organisasi, sehingga *stewardship theory* adalah model yang sesuai pada kasus organisasi sektor publik. Teori ini dapat dipraktikkan untuk menjelaskan eksistensi pemerintah desa sebagai suatu lembaga yang berinteraksi langsung dengan masyarakat bisa dipercaya untuk bertindak sesuai dengan kepentingan masyarakat dengan melaksanakan tugas dan fungsi yang sesuai dan tepat, mampu bertanggungjawab dengan keuangan yang diamanahkan kepadanya, sehingga tujuan - tujuan seperti ekonomi, pelayanan, maupun kesejahteraan masyarakat dapat tercapai secara maksimal. Untuk melaksanakan tanggungjawab tersebut maka *stewards* atau manajemen/aparatur pemerintahan mengerahkan seluruh kemampuan dan keahliannya dalam efektifitas pengendalian internal agar dapat menghasilkan laporan informasi pengelolaan keuangan yang berkualitas dan transparan. Pemerintah desa diharuskan melaksanakan tugasnya membuat laporan pertanggungjawaban berupa penyajian laporan keuangan yang akuntabel dan transparan sesuai dengan karakteristik laporan keuangan yang relevan, andal, dapat dipahami dan dibandingkan.

Sifat-sifat dasar manusia yang dapat dipercaya, mampu bertindak dan bertanggungjawab, berintegritas dan memiliki kejujuran menjadi dasar filosofi dibangunnya *stewardship theory* untuk kepentingan publik. *stewardship theory* juga menganggap bahwa terdapat hubungan yang kuat antara kesuksesan organisasi dalam melindungi, memaksimalkan kinerja organisasi dan kepentingan pemilik dengan kepuasan pemilik. *Stewardship Theory* ini berpatokan pada perilaku untuk saling berkerjasama dan bertanggung jawab dalam suatu organisasi. Dengan kerjasama, akan menciptakan pencapaian tujuan organisasi dengan mengesampingkan tujuan serta kepentingan yang berbeda-beda, karena pada dasarnya *Stewardship Theory* menjunjung tinggi nilai kebersamaan. Jika terdapat kepentingan yang berbeda antara *steward* dan *principal*, maka *steward* akan selalu menomorsatukan adanya kebersamaan. Sebab, *Stewardship Theory* berpedoman jika terdapat utilitas yang lebih besar terhadap perilaku kooperatif, dan perilaku itu dianggap sebagai perilaku rasional yang mudah diterima. Pada penelitian ini, penerapan *Stewardship Theory* terdapat pada peran pemerintah desa yang berperan sebagai *steward* yang mana wajib melaksanakan amanah dan mampu bertanggungjawab dengan apa yang diberikan oleh masyarakat sebagai *principal*. Pemerintah desa harus bisa melakukan tugas dan wewenang yang diamanatkan masyarakat dengan semaksimal mungkin dan sesuai dengan yang masyarakat harapkan. Kewajiban dan amanah tersebut harus mengesampingkan kepentingan pribadi mereka, melainkan untuk kepentingan *principal* atau masyarakat, apabila mereka belum bisa melakukannya maka mereka akan melaksanakan sampai terwujudnya kewajiban untuk kepentingan bersama.

2. Agency Theory

Di dalam buku *Theory of the firm: Managerial behavior, agency cost and ownership structure* menjelaskan bahwa dalam *Agency Theory* adanya konflik antara manajemen selaku (*Agent*) dengan pemilik selaku (*Principal*). *Principal* ingin mengetahui segala informasi termasuk aktivitas manajemen, yang terkait dengan investasi atau dananya dalam perusahaan. Hal ini dilakukan dengan meminta laporan pertanggungjawaban dari agen (manajemen)³⁵. *Agency* adalah keterikatan hubungan antara dua pihak yang mana pihak satu sering disebut dan *agent*, yaitu yang diberikan kewenangan untuk melakukan perbuatan dan atas nama serta dibawah pengawasan pihak lain yaitu *principal*. *Agency Theory* mencoba untuk menjalin hubungan yang formal antara prinsipal dan agen atau pihak – pihak yang berkepentingan dalam proses penyusunan budget. Teori ini menekankan pada perencanaan, pengukuran prestasi dan imbalan yang diberikan agar para manajer berperilaku positif atau menguntungkan perusahaan secara keseluruhan³⁶. Pihak *principal* yang berperan sebagai pemilik perusahaan wajib menyediakan fasilitas yang diperlukan pihak *agent* yang dalam hal ini dapat berupa dana dan sarana prasarana yang dibutuhkan perusahaan dalam pengoperasian perusahaannya. Dan *agent* sebagai pihak manajemen perusahaan berkewajiban untuk mengelola sumber daya yang dimiliki untuk memakmurkan perusahaan dan keuntungan pemegang saham dengan adanya peningkatan nilai perusahaan. *Agent* sebagai pengelola wajib untuk memberikan laporan yang diberikan secara periodik kepada *principal* tentang tata kelola yang dilakukan *agent*. *Principal* kemudian akan melihat hasil kinerja *agent* dengan

³⁵Jensen, and Meckling, 1976, "Theory of the firm: Managerial behavior, agency cost and ownership structure", *Journal of Finance Economic* 3:305-360

³⁶Anne Wyatt, 'An Accounting Perspective', *The Management of Intellectual Property*, 2006, 40–65 <<https://doi.org/10.4337/9781847201553.00009>>.

melihat laporan keuangan yang digunakan sebagai sarana pertanggungjawaban manajemen kepada pemiliknya.

Agency Theory sudah sering digunakan pada sektor publik yang memiliki tujuan untuk memenuhi keinginan masyarakat. *Agency Theory* dapat diterapkan di pemerintahan khususnya di pemerintahan Desa yang akan diteliti pada penelitian ini. Teori keagenan ini akan menjelaskan bagaimana hubungan kontraktual antara agent dan principal (yaitu antara pemerintah dan rakyat), *asymetry information* yang terjadi, perilaku – perilaku disfungsi pejabat publik, serta bagaimana *agency cost* terjadi dan cara mengurangnya. Dengan menggunakan sudut pandang teori ini, akan menjadi mudah untuk memetakan hubungan antara rakyat dan pejabat (pemerintah), menjelaskan penyebab munculnya perilaku oportunistis, serta berbagai upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk mengurangi perilaku tersebut. Hubungan-hubungan keagenan ini akan memberikan gambaran yang memadai siapa saja yang terlibat dalam hubungan kontraktual antara rakyat dengan pemerintah, sehingga dapat dipetakan penelitian-penelitian selanjutnya yang dapat dilakukan³⁷.

Hubungan *Agency Theory* terhadap Transparansi dan akuntabilitas yaitu mengenai peran pemerintah desa sebagai *agent* yang memiliki kewenangan dalam melaksanakan kewajiban melakukan pengelolaan dana desa dengan baik dimana pengelolaan yang baik harus melibatkan masyarakat (*principal*) sebagai pengguna informasi keuangan dan pengambilan kebijakan. Dalam hubungan teori keagenan, pemerintah desa yang berperan sebagai *agent* harus melaksanakan apa yang menjadi kepentingan masyarakat dan masyarakat berperan sebagai objek pelayanan publik sebagai prinsipnya dan memberikan informasi dari pusat kepada daerah yang mana data-data dana desa bisa

³⁷ Akhmad Samsul Ulum, 'Peran Pengukuran Kinerja Dalam Mendukung Good Governance Dalam Perspektif Agency Theory', *Jurnal Dinamika Akuntansi*, 3.1 (2011), 60–66.

memberikan informasi dan mempermudah masyarakat untuk mengawasi pemerintah desa dalam proses pengelolaan dana desa. Di dalam lingkup *agency theory* pemberian akses informasi ini bertujuan agar meminimalisir *agency cost* karena asimetri informasi. Salah satu informasi yang juga cukup penting (selain laporan keuangan) yang harus diberikan yaitu informasi kinerja pemerintah desa, dari informasi ini *principal* bisa melihat keberhasilan ataupun kegagalan suatu pemerintahan. Berdasarkan *agency theory* pengelolaan pemerintah desa harus dapat diawasi untuk memastikan bahwa pengelolaan dana desa dilakukan dengan penuh kepatuhan kepada peraturan dan ketentuan yang berlaku. Meningkatnya akuntabilitas pemerintah desa sudah tentu akan memberikan informasi dan kepercayaan terhadap pemerintah desa yang itu artinya *information asymetry* akan berkurang sehingga tingkat korupsi dan penyelewengan anggaran dana desa akan lebih kecil³⁸.

3. Transparansi

Di dalam KBBI Transparansi adalah kenyataan dan kejelasan³⁹. Transparansi berarti suatu keterbukaan secara nyata, menyeluruh, dan memberi ruang kepada seluruh lapisan masyarakat untuk berpartisipasi secara aktif dalam proses pengelolaan sumber daya publik. Apabila dikaitkan dengan anggaran, transparansi dapat didefinisikan sebagai keterbukaan kepada masyarakat yang meliputi fungsi dan struktur pemerintah, tujuan kebijakan fiskal, sektor keuangan publik, dan proyeksi-proyeksinya⁴⁰. Transparansi dalam lingkup penyelenggaraan pelayanan publik adalah transparan, mudah, diakses oleh semua pihak yang

³⁸ Muhammad Luthfi Iznillah, Amir Hasan, and Yesi Mutia, 'Analisis Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Di Kecamatan Bengkalis', *Jurnal Akuntansi*, 7.1 (2018), 29–41.

³⁹ Departemen, *Kamus Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, 731.

⁴⁰ Moh. Wahyudin Zarkasyi. *Good Corporate Governance Pada Badan Usaha Manufaktur, Perbankan, dan Jasa Keuangan*. (Bandung: Alfabeta, 2008), 39.

berkepentingan serta tersedianya sarana prasarana yang memadai dan mudah dimengerti. Pelayanan publik merupakan segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima kebutuhan pelayanan maupun pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.

a. Konsep Transparansi

Konsep transparansi mengarah pada suatu keadaan dimana segala aspek dari proses penyelenggaraan pelayanan bersifat terbuka dan dapat diketahui dengan mudah oleh para pengguna dan *stakeholders* yang membutuhkan. Konsep ini mengacu pada tingkat keterbukaan dan kejelasan suatu proses pengelolaan keuangan yang mencakup pemaparan informasi, pembuatan kebijakan, pengambilan keputusan, dan akses serta evaluasi oleh pihak yang berkepentingan. Transparansi mempunyai peran penting untuk berbagai konteks, termasuk pemerintahan, bisnis, organisasi non-profit, dan kebijakan publik. Tingkat transparansi yang tinggi mampu menciptakan kepercayaan, meminimalisir ketidakpastian, dan memberikan dasar bagi keterlibatan dan partisipasi yang lebih baik dari pihak-pihak yang terlibat. Ada 4 indikator yang dapat digunakan untuk mengukur kriteria transparansi pelayanan publik yaitu⁴¹:

- 1) **Ketersediaan sistem informasi**, salah satu penerapan prinsip transparansi adalah publikasi secara online. Dengan adanya adanya sistem informasi ini, diharapkan dapat meningkatkan

⁴¹ Ramadhani Ria Rizki, "Persepsi stakeholders internal terhadap akuntabilitas dan transparansi laporan keuangan Universitas Sebelas Maret pasca ditetapkan sebagai badan layanan umum (studi kasus pada laporan keuangan tahun 2009)" (Skripsi, Universitas Sebelas Maret, 2011). 28

transparansi informasi mengenai pengelolaan dana desa.

- 2) **Aksesibilitas terhadap pengelolaan dana desa**, yaitu adanya asas keterbukaan yang dibangun atas dasar kebebasan arus informasi agar informasi mengenai pengelolaan dana desa secara langsung dapat diterima bagi pihak-pihak yang membutuhkan.
- 3) **Publikasi laporan keuangan**, setiap lembaga layanan publik harus memiliki kesadaran untuk mempublikasikan laporan keuangan sebagai bentuk keterbukaan informasi (transparansi) dan pertanggungjawaban atas penggunaan sumber daya.
- 4) **Ketersediaan informasi kinerja**, Informasi atas hasil kinerja merupakan salah satu wujud transparansi. Seorang pimpinan lembaga publik bertanggungjawab terhadap kinerja lembaganya sesuai dengan ketentuan yang sudah disepakati. Transparansi membuat keterbukaan informasi sehingga pihak *stakeholders*, terutama eksternal, dapat menggunakannya untuk mengetahui penyalahgunaan yang mungkin terjadi.

Konsep Transparansi dalam penelitian ini adalah bentuk kemudahan akses masyarakat untuk mendapatkan informasi mengenai perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban. Tujuan dari dilakukannya Transparansi pemerintah desa yaitu untuk mewujudkan pertanggungjawaban pemerintah desa kepada masyarakat dan upaya peningkatan manajemen pengelolaan pemerintah desa.

b. Karakteristik Transparansi

Transparansi harus terbuka pada setiap aktivitasnya, dan siap menerima kritikan dari masyarakat, serta dapat dipertanggungjawabkan programnya. Berikut ini adalah karakteristik dari sebuah transparansi:

1) *Informativeness* (informatif)

Arus pemberian informasi, berita, prosedur, data, fakta, maupun penjelasan mekanisme kepada *stakeholders* yang membutuhkan informasi yang jelas dan akurat.

2) *Openess* (Keterbukaan)

Keterbukaan informasi merupakan hak yang harus diperoleh oleh *stakeholder*. Sehingga setiap *stakeholder* dapat mengakses segala informasi dan data yang telah diungkapkan.

3) *Disclosure* (Pengungkapan)

Pengungkapan yang dimaksud adalah pengungkapan atas aktivitas maupun kinerja secara finansial kepada *stakeholder*. Pengungkapan dibedakan menjadi dua, yaitu pengungkapan wajib dan pengungkapan sukarela. Pengungkapan wajib adalah pengungkapan segala sesuatu yang menjadi tanggung jawab perusahaan yang diwajibkan oleh standar akuntansi maupun yang tertera dalam standar operasional prosedur dan peraturan badan pengawas. Sedangkan pengungkapan sukarela adalah pengungkapan yang dilakukan secara sukarela diluar apa yang diwajibkan oleh perusahaan, standar akuntansi, dan peraturan badan pengawas.⁴²

c. Transparansi dalam Persepektif Akuntansi Syariah

⁴² Mardiasmo, *Akuntansi Sektor Publik*, Yogyakarta: Penerbit Andi, 2004, 19.

Salah satu unsur utama dalam pengelolaan keuangan yang baik adalah dengan adanya transparansi. Dalam konteks akuntansi syariah, transparansi digunakan untuk memastikan bahwa suatu entitas mengungkapkan dengan jelas segala aspek keuangan yang relevan dan sesuai dengan prinsip syariah. Transparansi artinya dalam menjalankan pemerintah, mengungkapkan hal-hal yang sifatnya material secara berkala kepada pihak-pihak yang memiliki kepentingan untuk itu, dalam hal ini adalah masyarakat luas. Transparansi dalam pandangan Akuntansi Syariah adalah sebuah kejujuran. Adanya Transparansi (kejujuran) ditujukan bukan hanya untuk orang lain melainkan untuk diri kita sendiri juga. Agar semua kegiatan yang kita lakukan tidak terbentur oleh kepentingan dari berbagai pihak. Implementasi dari transparansi yaitu pengungkapan informasi yang jelas terkait aset, kewajiban, pendapatan, dan pengeluaran yang terkait dengan aktivitas pengelolaan keuangan yang melibatkan prinsip-prinsip syariah. Misalnya, pengungkapan terkait dengan pematuhan terhadap prinsip syariah, seperti pembagian keuntungan sesuai dengan prinsip bagi hasil (mudharabah) atau penjelasan terinci tentang aset dan investasi sesuai syariah.

Rasulullah SAW telah memberikan contoh yang teladan dalam berniaga, misalnya ; Transparansi adalah sesuatu yang dapat dipercaya kepada seseorang baik harta, ilmu pengetahuan, ataupun sesuatu yang bersifat rahasia yang wajib disampaikan kepada yang berkepentingan karna orang yang jujur (transparan) adalah orang yang mengatakan hal yang sebenarnya. Di dalam Al-Qur'an sudah dijelaskan pada Q.S Al-Maidah: 67 yang berbunyi :

﴿ يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ
تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ ۗ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ
اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ

Artinya: “Hai Rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu. Dan jika tidak kamu kerjakan (apa yang diperintahkan itu, berarti) kamu tidak menyampaikan amanat-Nya. Allah memelihara kamu dari (gangguan) manusia. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir.”

Ayat tersebut menjelaskan bahwa transparansi merupakan salah satu aspek dalam sistem pengelolaan keuangan yang baik. Transparansi mewajibkan adanya pertanggungjawaban terbuka, aksesibilitas terhadap laporan keuangan dengan mudah serta adanya publikasi laporan keuangan, hak untuk tahu hasil audit dan ketersediaan informasi kinerja instansi.⁴³ Suatu entitas diharapkan mampu mengimplementasikan informasi keuangan yang jelas dan transparan. Ini mencakup laporan keuangan yang menyajikan dengan rinci posisi keuangan, hasil operasi, dan arus kas yang sesuai dengan prinsip syariah. Dengan menciptakan transparansi pada setiap aspek operasional dan keuangan, entitas pemerintah desa dapat membangun kepercayaan dan mendapatkan dukungan dari pihak yang berkepentingan, yang dalam hal ini adalah termasuk pemerintah kabupaten, pemerintah pusat, dan masyarakat umum yang peduli dengan prinsip-prinsip keuangan Islam.

⁴³ Junjuna, Mochammad Ilyas, ‘Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, dan ICGG terhadap Tingkat Kepercayaan Muzakki di Lembaga Amil Zakat Dompot Amanah Umat’, *Akuntansi: Jurnal Akuntansi Integratif* 6.2 (2020): 112-125.

4. Akuntabilitas

Akuntabilitas artinya perbuatan bertanggung jawab; keadaan untuk dipertanggung jawabkan; atau sering juga diartikan dengan tanggung gugat; keadaan dapat dimintai pertanggungjawaban⁴⁴. Akuntabilitas adalah prinsip pertanggungjawaban publik artinya bahwa setiap proses penganggaran mulai dari penyusunan dan pelaksanaan harus benar-benar dilaporkan dan dipertanggungjawabkan dari awal hingga akhir sesuai dengan rencana pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Secara garis besar akuntabilitas dapat diartikan bahwa tanggungjawab pimpinan selaku pemilik wewenang untuk mengelola sumber daya publik.

a. Konsep Akuntabilitas

Konsep akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewajiban untuk meminta pertanggungjawaban⁴⁵. Tujuan dari akuntabilitas adalah untuk mengetahui pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan Dana Desa kepada masyarakat, dimana kepala desa sebagai penanggungjawab utama⁴⁶. Dengan adanya akuntabilitas ini, kinerja pemerintah desa dalam melaksanakan tugas dan fungsinya akan terukur. Kinerja suatu organisasi dapat terlihat dari sisi pertanggungjawaban, seperti dalam pengelolaan dana, program kerja yang telah tersusun, maupun kebijakan lain yang telah ditetapkan. Akuntabilitas membentuk

⁴⁴ Raba, Manggaukang, *Akuntabilitas konsep dan Implementasi*, Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2006, 1.

⁴⁵ Januar Eko Prasetyo, 'Tazkiyatun Nafs: Kajian Teoritis Konsep Akuntabilitas', 2017, 19–33.

⁴⁶ Filda Gean Rosiana Dewi and Sapari, 'Pengaruh Akuntabilitas Alokasi Dana Desa, Transparansi, Kebijakan Desa, Partisipasi Masyarakat Terhadap Pembangunan', *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 9.5 (2020), 1–20.

dasar untuk tata kelola yang baik, kepercayaan masyarakat, dan efektivitas organisasi. Ketika individu atau entitas bertanggung jawab atas tindakan dan keputusan mereka, ini menciptakan dasar yang kuat untuk pembangunan dan pertumbuhan yang berkelanjutan. Mardiasmo menjelaskan terdapat empat indikator akuntabilitas yang harus dipenuhi oleh organisasi sektor publik yaitu⁴⁷:

- 1) **Akuntabilitas Kejujuran dan Hukum**, yaitu akuntabilitas lembaga-lembaga publik berkewajiban berperilaku jujur dan menaati ketentuan hukum yang berlaku. Pengelolaan dana desa harus dilakukan secara benar dan telah mendapatkan otorisasi. Akuntabilitas hukum menyangkut tentang kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain yang diisyaratkan dalam menjalankan organisasi, sedangkan akuntabilitas kejujuran berkaitan dengan penghindaran penyalahgunaan jabatan dan tindakan KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme). Akuntabilitas hukum menuntut penegakan hukum (lawonfercement), sedangkan akuntabilitas kejujuran menuntut adanya praktik organisasi yang sehat dan tidak terjadi penyelewengan.
- 2) **Akuntabilitas Proses**, yaitu pertanggungjawaban lembaga publik dalam melakukan pengelolaan organisasi secara efisien dan efektif. yang berarti bahwa dalam pengelolaan dana desa harus dapat dipertanggungjawabkan, dengan kata lain tidak terjadi inefisiensi dan ketidakefektivan organisasi.
- 3) **Akuntabilitas Program**, berkaitan dengan pertimbangan apakah tujuan yang ditetapkan apakah bisa dicapai, dan apakah lembaga telah mempertimbangkan opsi program yang memberikan

⁴⁷ Mardiasmo, "Akuntansi Sektor Publik," (Yogyakarta: ANDI, 2018).

hasil yang efisien. Lembaga-lembaga publik harus bertanggungjawab dengan program yang telah dibuat sampai pada pelaksanaan.

- 4) **Akuntabilitas Kebijakan**, terkait dengan pertanggungjawaban lembaga publik atas kebijakan yang diambil. Dalam membuat kebijakan harus dipertimbangkan apa tujuan kebijakan, mengapa kebijakan digunakan, siapa yang akan merasakan kebijakan tersebut, pemangku kepentingan (*stakeholder*) mana yang akan terpengaruh dan memperoleh dampak positif dan negatif atas kebijakan tersebut.

b. Macam – macam Akuntabilitas

Akuntabilitas Publik terdiri dari 2 macam yaitu⁴⁸:

- 1) **Akuntabilitas Vertikal (*vertical accountability*)**

Akuntabilitas vertikal adalah pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan kepada otoritas yang lebih tinggi, contohnya seperti pertanggungjawaban unit-unit kerja (dinas) kepada pemerintah daerah, pertanggungjawaban pemerintah daerah kepada pemerintah pusat, dan pemerintah pusat kepada MPR.

- 2) **Akuntabilitas horizontal (*horizontal accountability*)**

Akuntabilitas horizontal adalah pertanggungjawaban kepada masyarakat luas. Kunci penting dalam mewujudkan akuntabilitas yaitu adanya pemberian kapasitas untuk melaksanakan suatu aktivitas, adanya pemberian keleluasaan dan adanya pemberian kewenangan.

⁴⁸ Meriska Sari, Sri Mintarti, and Yunita Fitria, 'Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Organisasi Keagamaan', 15.2 (2018), 45–56.

Terwujudnya akuntabilitas merupakan tujuan utama dari reformasi sektor publik.

c. Prinsip – prinsip Akuntabilitas

Prinsip-prinsip yang harus ada didalam sebuah akuntabilitas adalah sebagai berikut:

- a. Harus ada komitmen dari pimpinan dan seluruh staf instansi untuk melaksanakan pengelolaan dengan tujuan agar akunTabel.
- b. Harus ada suatu sistem yang dapat menjamin penggunaan sumber daya secara konsisten dengan peraturan hukum yang berlaku.
- c. Harus dapat menunjukkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.
- d. Berorientasi pada pencapaian visi dan misi, serta hasil dan manfaat yang akan diperoleh.
- e. Jujur, objektif, transparan, dan inovatif sebagai agen perubahan manajemen instansi pemerintah dalam bentuk pemutakhiran metode dan teknik pengukuran kinerja dan penyusunan laporan akuntabilitas.

d. Akuntabilitas dalam Persepektif Akuntansi Syariah

Akuntabilitas dalam pandangan Islam berbeda dengan akuntabilitas konvensional. Pemahaman akuntabilitas dalam Islam lebih luas daripada apa yang biasanya dipahami dalam akuntabilitas konvensional. Dalam Islam suatu pertanggungjawaban tidak hanya berkaitan antara manajemen dan orang yang berkepentingan, seperti penyedia sumber daya keuangannya, atau pemerintah dan masyarakat pada umumnya, tetapi juga berkaitan hubungan antara manajemen dan Tuhan, sebagai pemilik utama dari segalanya. Akuntabilitas

berpatokan pada tanggung jawab dan kewajiban dalam menjalankan tugas dan aktivitas bisnis sesuai dengan prinsip - prinsip syariah. Dalam konteks akuntansi syariah, akuntabilitas mencakup pemenuhan kewajiban moral dan etika terhadap pelanggan, investor, dan masyarakat umum.

Dalam konsep Islam, akuntabilitas bukan hanya dilaksanakan untuk memenuhi persyaratan hukum akuntabilitas, melainkan memiliki tujuan lain, yaitu untuk memenuhi hubungan dengan Sang Pencipta alam Semesta⁴⁹. Secara gamblang menyatakan bahwa akuntabilitas dalam akuntansi syari'ah meliputi akuntabilitas kepada Tuhan, manusia dan alam sekitar. Di dalam Al-Qur'an dijelaskan di dalam surah Al-Mudatsir: 38 yang berbunyi :

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ

Artinya: "Setiap orang bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukannya,"

Praktik akuntabilitas yang sesuai dengan ayat tersebut di atas adalah dengan cara melaporkan, mensosialisasikan, dan mengkomunikasikan kepada semua pihak mengenai pelaksanaan program-program yang telah dilaksanakan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat. Selain itu, tujuan akuntabilitas ini adalah untuk menindak lanjuti pihak-pihak yang kurang puas terhadap hasil kerja suatu organisasi yang telah dibebani amanah untuk menjalankan tugasnya. Akuntabilitas yang seperti ini dapat berfungsi sebagai pengikat akuntansi syariah kepada nilai yang dapat membangkitkan kesadaran ketuhanan. Akuntabilitas kepada Tuhan dilakukan dengan menerapkan syari'ah Islam dalam upaya

⁴⁹ Waluya, Atep Hendang, and Aforisma Mulauddin, 'Akuntansi: akuntabilitas dan transparansi dalam qs. al baqarah (2): 282-284,' *MUAMALATUNA* 12.2 (2020): 15-35.

menjaga mempertahankan amanah yang diberikan Allah SWT. Akuntabilitas kepada manusia dilakukan dengan memberikan laporan-laporan, informasi-informasi serta kebutuhan dari pihak-pihak yang berdedikasi dalam usaha. Akuntabilitas dengan alam dilakukan dengan menjaga lingkungan, tidak melakukan eksploitasi dan pencemaran lingkungan⁵⁰. Implementasi akuntabilitas yaitu penerapan prinsip-prinsip syariah dalam seluruh proses bisnis, dan menjamin bahwa keputusan dan tindakan bisnis didasarkan pada nilai - nilai Islam. Selain itu, audit dan evaluasi internal atau eksternal dapat digunakan untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip syariah serta menegakkan akuntabilitas.

Penerapan akuntabilitas dalam melakukan pengelolaan dana desa sangat dipengaruhi oleh isi kebijakan dan konteks implementasinya. Dalam penerapannya akuntabilitas sangat tergantung bagaimana pemerintah melakukan pengawasan dan pengarahan terhadap pengelolaan dana desa serta kritik terhadap aspirasi yang berada di masyarakat, dan partisipasi masyarakat dalam mendukung keberhasilan program. Maka dengan itu tingkat akuntabilitas dana desa memberi ruang bagi warga untuk menjadi aktif terlibat dalam penyelenggaraan pengawasan pembangunan, sehingga berpotensi menciptakan proses pembangunan yang transparan, akuntabel, responsive dan partisipatif. Memberi akses akuntabilitas pengelolaan dana desa kepada masyarakat penting dilakukan agar masyarakat mendapat informasi dan capaian - capaian dari pemerintah desa. Dana desa yang berasal dari masyarakat secara tidak langsung, menjadikan pemerintah wajib untuk mempertanggungjawabkan pengelolaannya kepada masyarakat.

⁵⁰ Akuntabilitas D A N Moralitas, 'PANDANGAN PEMILIK BADAN USAHA ISLAM TERHADAP', 1.2 (2011), 135-44.

5. Pengelolaan Dana Desa

Dana Desa adalah Dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat⁵¹. Pengelolaan keuangan adalah proses pengurusan penyelenggaraan penyediaan dana dan penggunaan dana dalam setiap program yang ingin dituju yang terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban. Pengelolaan keuangan desa menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan peraturan pelaksanaannya, kepala desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa. Dalam praktik kekuasaannya, kepala desa menguasai sebagian kekuasaannya kepada perangkat desa Pasal 75 ayat (2). Pengelolaan keuangan desa berdasarkan Pasal 93 ayat (1) PP Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang, Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa meliputi Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban⁵².

Ibu Sri Mulyani menyatakan bahwa Dana Desa dianggarkan setiap tahun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada masing - masing desa sebagai suatu sumber pendapatan desa. Tujuan dari pemberian Dana Desa yaitu untuk: (1) mengembangkan/meningkatkan pelayanan publik di Desa; (2) mengentaskan kemiskinan, memajukan atau melestarikan perekonomian desa,; (3) mengatasi

⁵¹ Susliyanti, 'Pengaruh Akuntabilitas Keuangan Dan Akuntabilitas Kinerja Terhadap Kepercayaan Dan Kepuasan Masyarakat Atas Penggunaan Dana Desa,' 7.

⁵² Siti Khoiriah and others, 'ANALISIS SISTEM PENGELOLAAN DANA DESA BERDASARKAN', 1, 2017.

kesejangan pembangunan antar desa, dan; (4) memperkuat masyarakat desa menjadi subjek dari pembangunan⁵³.

Pengelolaan dana desa menyesuaikan pada kebutuhan masyarakat dan prioritas program yang ditetapkan oleh pemerintahan desa. Tujuan pemberian dana desa yang bersumber dari APBN untuk diprioritaskan pada pembangunan dan pemberdayaan masyarakat⁵⁴. Ini berarti bahwa dana desa yang berasal dari pusat tidak hanya difokuskan untuk pembangunan infrastruktur desa tetapi juga untuk pemberdayaan masyarakat desa. Pedoman umum pelaksanaan penggunaan dana desa tahun 2020 berdasarkan lampiran peraturan menteri desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi republik Indonesia no 11 tahun 2019 tentang prioritas penggunaan dana desa tahun 2020, wajib untuk dijadikan acuan oleh pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, dan desa dalam mengelola prioritas penggunaan dana desa berdasarkan tata kelola desa yang baik dan adil⁵⁵. Pengelolaan Dana Desa pada dasarnya adalah hak Pemerintah Desa untuk mengatur dan mengelola sesuai dengan kewenangan dan prioritas keperluan masyarakat setempat dengan memprioritaskan prinsip keadilan. Tapi meski demikian, dalam rangka mengawasi dan memastikan tercapainya sasaran pembangunan desa, Pemerintah menetapkan prioritas penggunaan atau pemakaian dana desa setiap tahunnya. Prinsip penggunaan Dana Desa menurut Kementerian Keuangan (2017) antara lain⁵⁶:

⁵³ Azizah, Wahidatul, and Andayani Andayani, 'AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI PENGELOLAAN DANA DESA,' *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA)* 11.10 (2022).

⁵⁴ Hulu, "Pengelolaan Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa," 21.

⁵⁵ Raharjo muiz muhammad, *PENGELOLAAN DANA DESA*, Jakarta timur : PT Bumi Aksara, 2020, 19.

⁵⁶ Azizah, 'AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI PENGELOLAAN DANA DESA,' 6.

- 1) keadilan, yang dimaksud adalah memprioritaskan atau mengutamakan hak dan keperluan seluruh warga Desa tanpa membeda-bedakan;
- 2) kebutuhan prioritas, yang dimaksud adalah Mendahulukan atau mengutamakan keperluan Desa yang lebih mendesak, lebih diperlukan dan berkaitan langsung dengan keperluan sebagian besar masyarakat Desa;
- 3) kewenangan Desa, yang dimaksud adalah mengutamakan atau memprioritaskan kewenangan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa;
- 4) partisipatif, yang dimaksud adalah memprioritaskan atau mengutamakan prakarsa dan kreatifitas Masyarakat;
- 5) swakelola dan berbasis Sumber Daya Desa, yang dimaksud adalah memprioritaskan atau mengutamakan penyelenggaraan secara mandiri dengan pendayagunaan sumberdaya alam Desa, mengutamakan atau mendahulukan tenaga, pikiran dan keterampilan warga Desa dan kearifan Lokal; dan
- 6) tipologi Desa, yang dimaksud adalah mempertimbangkan keadaan atau kondisi dan kenyataan karakteristik geografis, sosiologis, antropologis, ekonomi, dan ekologi Desa yang khas, serta perubahan atau perkembangan dan kemajuan atau peningkatan Desa.

6. Kepercayaan Masyarakat

Kepercayaan adalah sebuah keyakinan kepada seseorang akan menemukan apa yang diinginkan pada mitra pertukaran. Kepercayaan melibatkan kesediaan seseorang untuk bertindak laku tertentu karena keyakinan bahwa mitranya akan memberikan apa yang ia harapkan dan suatu harapan yang umumnya dimiliki seseorang bahwa kata, janji

atau pernyataan orang lain dapat dipercaya. Kepercayaan adalah kemauan seseorang untuk bertumpu pada orang lain dimana kita memiliki keyakinan padanya. Kepercayaan merupakan kondisi mental yang didasarkan oleh situasi seseorang dan konteks sosialnya. Ketika seseorang mengambil suatu keputusan, ia akan lebih memilih keputusan berdasarkan pilihan dari orang-orang yang lebih dapat ia percaya dari pada yang kurang dipercayai.

Kepercayaan masyarakat diartikan bahwa masyarakat percaya jika pemerintah mampu, baik, dan jujur dalam melaksanakan amanah sebagai pemegang kekuasaan atas kepuasan masyarakat. Kepuasan masyarakat terjadi apabila masyarakat merasa pertanggungjawaban pemerintah dapat dipercaya dan diyakini benar-benar. Kepercayaan masyarakat yang dimaksud dalam penelitian ini adalah rasa percaya masyarakat kepada pemerintah atas pelaksanaan tugas pemerintah⁵⁷.

a. Indikator – indikator Kepercayaan Masyarakat

Inayah (2018) menyatakan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dapat diukur melalui 3 (tiga) indikator yaitu⁵⁸:

- 1) **Kredibilitas**, berhubungan dengan penilaian masyarakat bahwa pemerintahan desa dapat dipercaya.
- 2) **Kompetensi**, menunjukkan kualitas dan pengetahuan aparatur desa dalam melakukan pengelolaan desa.

⁵⁷ Eni, 'Pengaruh Akuntabilitas Keuangan Dan Akuntabilitas Kinerja Terhadap Kepercayaan Dan Kepuasan Masyarakat Atas Penggunaan Dana Desa', 12.

⁵⁸ Zahrotul Muanisah, Nurul Inayah, 'Hubungan Kepercayaan, Transparansi, Dan Akuntabilitas Terhadap Loyalitas Muzakki Pada Badan Amil Zakat (Studi Kasus di Kecamatan Tegalsari Banyuwangi)' *ACTIVA: Jurnal Ekonomi Syariah* 1, no. 2 (October 25, 2018): 18-33.
<http://www.jurnal.stitnualhikmah.ac.id/index.php/activa/article/view/318>.

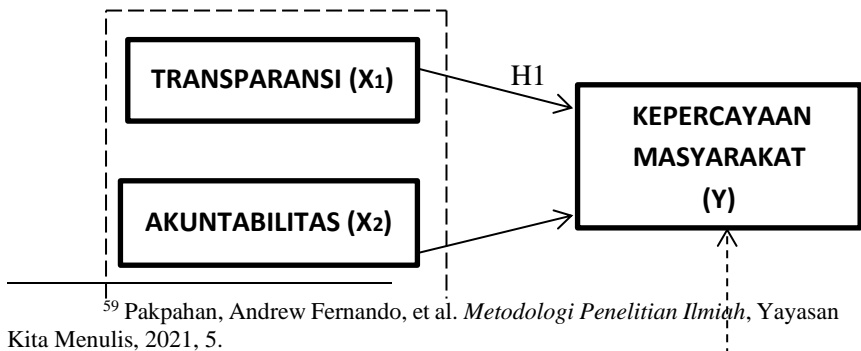
- 3) **Sikap moral**, yaitu sikap para aparatur di lembaga pemerintahan terhadap masyarakat.

B. Kerangka Pemikiran

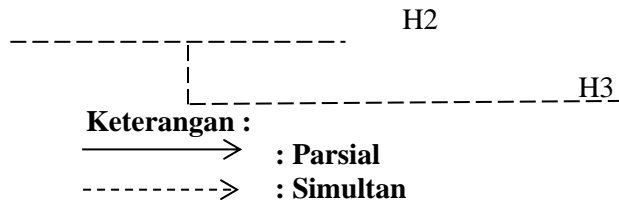
Kerangka pemikiran merupakan turunan dan spesifikasi dari masalah penelitian. Masalah penelitian adalah bagian dari kerangka pemikiran. Kerangka pemikiran dibangun sebagai acuan alur logika sistematis atau model konseptual yang menggambarkan kerangka teoritis penelitian. Kerangka pemikiran berisi teori pokok yang digunakan dalam penelitian untuk membantu peneliti menempatkan konteks yang lebih luas dan membantu menguji rumusan masalah⁵⁹. Dalam penelitian ini variable independen (X) yang digunakan yaitu Transparansi dan Akuntabilitas yang akan dihubungkan dengan pengaruhnya terhadap variable dependen (Y) yaitu Kepercayaan Masyarakat. Maka kerangka pemikiran yang akan dikembangkan dalam penelitian ini secara ringkas digambarkan sebagai berikut :



Gambar 2.2
Kerangka Berfikir



⁵⁹ Pakpahan, Andrew Fernando, et al. *Metodologi Penelitian Ilmiah*, Yayasan Kita Menulis, 2021, 5.



C. Pengajuan Hipotesis

Hipotesis adalah dugaan sementara dalam sebuah penelitian dan jawaban yang diberikan hanya didasarkan pada teori yang relevan bukan pada bukti empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Terdapat 2 jenis hipotesis yang ada dalam penelitian. Hipotesis nol (H_0) menyatakan tidak adanya hubungan antara dua variabel atau lebih atau tidak adanya perbedaan antara dua kelompok atau lebih. Hipotesis alternative (H_a) yaitu hipotesis yang menyatakan adanya hubungan antara dua variabel atau lebih atau adanya perbedaan antara dua kelompok atau lebih⁶⁰. Hipotesis ini berisi sebuah pernyataan yang singkat, lugas dan jelas dimana pernyataan tersebut dapat diuji dan dijawab menggunakan teknik analisis yang tersistematis. Hipotesis yang telah ditetapkan nantinya akan diuji lebih lanjut agar mendapatkan hasil yang relevan dengan masalah yang terjadi. Dalam penelitian ini pengujian hipotesis bertujuan untuk mengetahui pengaruh transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana desa terhadap kepercayaan masyarakat. Berdasarkan rumusan masalah, penelitian terdahulu, landasan teori dan kerangka berpikir yang telah dipaparkan sebelumnya, maka dapat dikembangkan dengan hipotesis sebagai berikut:

1. Pengaruh Transparansi terhadap Kepercayaan Masyarakat

Transparansi mampu menciptakan kepercayaan timbal-balik antara pemerintahan desa dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan didalam

⁶⁰ Feni Hikmawati, *Metodologi Penelitian*, (Depok: Raja Grafindo, 2018),

memperoleh informasi dan menjamin kemudahan didalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. Seluruh masyarakat memiliki kesempatan memperoleh akses informasi yang terkait dengan transparansi pengelolaan dana desa, sehingga semakin terbuka pemerintahan terhadap pengelolaan dana desa maka semakin meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan tersebut. *Stewardship Theory* dalam pengembangan hipotesis ini diasumsikan pemerintah desa yang hakekatnya dapat dipercaya, bertanggungjawab, berintegritas terhadap masyarakat desa talang baru. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Mandy Tania Sari, dan Titik Mildawati pada tahun 2020 menyatakan bahwa Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan Masyarakat⁶¹. Berdasarkan uraian diatas maka hipotesis yang diajukan adalah :

H1 : Transparansi berpengaruh positif terhadap Kepercayaan masyarakat.

2. Pengaruh Akuntabilitas terhadap Kepercayaan Masyarakat.

Lembaga pemerintahan desa harus adil dan bertanggung jawab akan segala aktivitasnya dalam mengelola dana desa. Sehingga mendapat kepercayaan yang tinggi dari masyarakat. Akuntabilitas adalah upaya atau aktivitas untuk menghasilkan pengungkapan yang benar. *Agency Theory* dalam pengembangan hipotesis ini menganggap hubungan antara pemerintah desa dengan masyarakat dimana pemerintah desa bertanggungjawab dalam pengelolaan dana desa sehingga masyarakat dapat merasakan hasil dari pengelolaan dana desa. Teori atribusi relevan dengan akuntabilitas lembaga pemerintahan desa, karena pengetahuan masyarakat tentang kinerja

⁶¹ Sari, 'Pengaruh Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa, Transparansi, dan Kebijakan Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat', 14.

pemerintahan desa merupakan penyebab eksternal yang dapat mempengaruhi kepercayaan masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Emilianus Jaa dan Sulityo pada tahun 2019⁶² mendapatkan hasil penelitian yang menunjukkan ada pengaruh yang signifikan akuntabilitas dalam pengelolaan ADD terhadap pembangunan desa di desa Gurun Turi. Berdasarkan uraian diatas maka hipotesis yang diajukan adalah :

H2 : Akuntabilitas berpengaruh positif terhadap Kepercayaan Masyarakat.

3. Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas terhadap Kepercayaan Masyarakat.

Transparansi dan akuntabilitas merupakan hal yang kerap dituntut masyarakat dari sebuah lembaga publik. Masyarakat merasa perlu mengetahui aliran dana dan kinerja lembaga tersebut. Apakah sumber daya yang mereka serahkan telah digunakan secara benar atau tidak. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Christa Yunnita Garung dan Linda Lomi Ga pada tahun 2020 dalam penelitian ini menunjukkan bahwa akuntabilitas dan transparansi berpengaruh secara simultan terhadap pengelolaan alokasi dana desa⁶³. Berdasarkan uraian diatas maka hipotesis yang diajukan adalah:

H3 : Transparansi dan Akuntabilitas berpengaruh positif terhadap Kepercayaan Masyarakat.

⁶² Jaa, 'Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, dan Partisipasi Masyarakat pada Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Terhadap Pembangunan Desa (Studi Kasus di Desa Gurung Turi Kabupaten Manggarai Timur)', 6.

⁶³ Garung, 'Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Add) Dalam Pencapaian Good Governance Pada Desa Manulea, Kecamatan Sasitamean, Kabupaten Malaka, 21.

DAFTAR RUJUKAN

BUKU :

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Jakarta : PN. Balai Pustaka, 1984.

Sudjana, *Strategi Pengelolaan dan Pengembangan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat*, Jakarta: Depdiknas, 2003.

Khadaffi, M., Siregar, S., Noch, M. Y., Nurlaila, N., Harmain, H., & Sumartono, *Akuntansi Syariah*, Medan: MADENATERA, 2016.

Hasanah, N., & Fauzi, *Akuntansi pemerintahan*, Bogor: In Media 2017.

Moh. Wahyudin Zarkasyi, *Good Corporate Governance Pada Badan Usaha Manufaktur, Perbankan, dan Jasa Keuangan*, Bandung: Alfabeta, 2008.

Mardiasmo, *Akuntansi Sektor Publik*, Yogyakarta: Penerbit Andi, 2004.

Raba, Manggaukang, *Akuntabilitas konsep dan Implementasi*, Malang: Universitas Muhammadiyah malang, 2006.

Mardiasmo, *Akuntansi Sektor Publik*, Yogyakarta: ANDI, 2018.

Raharjo muiz muhammad, *PENGELOLAAN DANA DESA* , Jakarta timur : PT Bumi Aksara, 2020,

Pakpahan, Andrew Fernando, et al. *Metodologi Penelitian Ilmiah*, Jakarta : Yayasan Kita Menulis, 2021.

Feni Hikmawati, *Metodologi Penelitian*, Depok: Raja Grafindo, 2018.

Sugiyono, *metode penelitian bisnis*, Cet. Ke-16, Bandung: CV Alfabeta, 2012.

Sugiyono, *Metodelogi penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2007.

Morissan, *Metode Penelitian Survey*, Jakarta : Prenada media Group, 2012.

JURNAL :

Aprilia, Isna, 'Determinan Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dan Dampaknya Terhadap Kepercayaan Masyarakat', *Akurasi : Jurnal Studi Akuntansi Dan Keuangan*, 2.2 (2019), 109–22.

Dewi, Filda Gean Rosiana, and Sapari, 'Pengaruh Akuntabilitas Alokasi Dana Desa, Transparansi, Kebijakan Desa, Partisipasi Masyarakat Terhadap Pembangunan', *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 9.5 (2020), 1–20.

Garung, Christina Yunnita, and Linda Lomi Ga, 'Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Add) Dalam Pencapaian Good Governance Pada Desa Manulea, Kecamatan Sasitamean, Kabupaten Malaka', *Jurnal Akuntansi : Transparansi Dan Akuntabilitas*, 8.1 (2020), 19–27.

Hanifah, Suci Indah & Praptoyo, Sugeng, 'Akuntabilitas Dan Transparansi Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes)', *Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi*, 4.8 (2015), 1–15

Hulu, Yamulia, R Hamdani, Harahap Muhammad, and Arif Nasution, 'Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial Pengelolaan Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa', 10.1 (2018), 146–54

Iznillah, Muhammad Luthfi, Amir Hasan, and Yesi Mutia, 'Analisis Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Di Kecamatan Bengkalis', *Jurnal Akuntansi*, 7.1 (2018), 29–41

Jaa, Emilianus, Sulistyoyo Sulistyoyo, and Supami Wahyu Setiyowati, 'Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, Dan Partisipasi

Masyarakat Pada Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Add) Terhadap Pembangunan Desa', *Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi*, 7.1 (2020), 1–9

Permatasari, Nurhidayah Chairany, and Nurul Hasanah Uswati Dewi. "Pandangan Pemilik Badan Usaha Islam Terhadap Akuntabilitas Dan Moralitas." *The Indonesian Accounting Review* 1.2 (2011): 135-144.

Prasetio, Januar Eko, 'Tazkiyatun Nafs: Kajian Teoritis Konsep Akuntabilitas', 2017, 19–33

Purwanto, Nfn, 'Variabel Dalam Penelitian Pendidikan', *Jurnal Teknodik*, 6115 (2019), 196–215

Sa'adah, Lailatus, and Moh Syadeli, 'Akuntabilitas Dan Transparansi Aparatur Desa Dalam Pengelolaan Keuangan Pengaruhnya Terhadap Tingkat Kepercayaan Masyarakat Melalui Kualitas Pelayanan (Studi Pada Desa-Desa Di Kecamatan Dau Kabupaten Malang)', *Jurnal Administrasi Dan Bisnis*, 15.1 (2021), 9–15

Sari, Mandy Tania, and Titik Mildawati, 'Pengaruh Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa, Transparansi, Dan Kebijakan Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat. Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi. e-ISSN:2460-0585', *Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 8.12 (2018), 1–17

Sari, Meriska, Sri Mintarti, and Yunita Fitria, 'Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Organisasi Keagamaan', 15.2 (2018), 45–56

Setiawan, Ade, 'Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Mewujudkan Good Governance', *Prosiding Seminar Nasional Akuntansi Dan Manajemen (SENAMA)*, 1.1 (2022), 169

Sofyani, Hafiez, and Afrizal Tahar, 'Peran Akuntabilitas Dan Transparansi Pemerintah Desa Indonesia Terhadap Kepercayaan Masyarakat Desa: Kasus Di Kabupaten Bantul', *Jurnal Akademi Akuntansi*, 4.1 (2021), 10–25

Susliyanti, Eni Dwi, and Enita Binawati, 'Pengaruh Akuntabilitas

Keuangan Dan Akuntabilitas Kinerja Terhadap Kepercayaan Dan Kepuasan Masyarakat Atas Penggunaan Dana Desa’, *EFEKTIF Jurnal Bisnis Dan Ekonomi*, 11.1 (2020), 1–12

Ulum, Akhmad Samsul, ‘Peran Pengukuran Kinerja Dalam Mendukung Good Governance Dalam Perspektif Agency Theory’, *Jurnal Dinamika Akuntansi*, 3.1 (2011), 60–66

Wardani, Dewi Kusuma, and Ratih Ranika Putri Utami, ‘Pengaruh Transparansi Pengelolaan Keuangan Dana Desa Dan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Desa Sidoharjo’, *Kajian Bisnis STIE Widya Wiwaha*, 28.1 (2020), 35–50

Wyatt, Anne, ‘An Accounting Perspective’, *The Management of Intellectual Property*, 2006, 40–65

Salle, Agustinus, “Makna transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah, *Jurnal kajian ekonomi dan keuangan daerah*, 2016, 4.

Imawan, Amrizal, Gugus Irianto, and Yeney Widya Prihatiningtias, “Peran akuntabilitas pemerintah desa dalam membangun kepercayaan publik,” *Jurnal Akuntansi Multiparadigma* 10.1 (2019): 156-175.

Flambonita, Suci, et al, “PENGELOLAAN DAN INFORMASI PERENCANAAN ANGGARAN DESA”, *Jurnal Pendidikan dan Pengabdian Masyarakat* 5.4 (2022), 378-394.

Hamdiah, Enis Nur, “Pengaruh Kompensasi Finansial, Kompensasi Non Finansial Internal dan Kompensasi Non Finansial Eksternal Terhadap Kinerja Karyawan (Studi Kasus PT. Perkebunan Kopi Kandangan)”, *SIMBA: Seminar Inovasi Manajemen, Bisnis, dan Akuntansi*, Vol. 4.(2022).

Ismail, Muhammad, Ari Kuncara Widagdo, and Agus Widodo, “Sistem akuntansi pengelolaan dana desa”, *Jurnal ekonomi dan bisnis* 19.2 (2016), 323-340.

Sugeng Hanifah, Suci Indah & Praptoyo, ‘Akuntabilitas Dan Transparansi Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan

Belanja Desa (APBDes)', *Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi*, 4.8 (2015), 1–15.

Riyanto, A., Suherman, A., & Prayudi, D, 'Akuntansi Dalam Perspektif Pengelolaan Keuangan Desa', *Seminar Nasional Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi Komputer* (2016).

Ade Setiawan, 'Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Mewujudkan Good Governance', *Prosiding Seminar Nasional Akuntansi Dan Manajemen (SENAMA)*, 1.1 (2022), 169.

Davis, James H., F. David Schoorman, and Lex Donaldson, 'Toward a stewardship theory of management', *The Academy of Management Review Vol. 22*, No. 1 (Jan., 1997), pp. 20-47.

Jensen, and Meckling, 1976, "Theory of the firm: Managerial behavior, agency cost and ownership structure", *Journal of Finance Economic* 3:305-360

Junjunan, Mochammad Ilyas, 'Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, dan IGCG terhadap Tingkat Kepercayaan Muzakki di Lembaga Amil Zakat Dompot Amanah Umat', *Akuntansi: Jurnal Akuntansi Integratif* 6.2 (2020): 112-125.

Zahrotul Muanisah, Nurul Inayah, 'Hubungan Kepercayaan, Transparansi, Dan Akuntabilitas Terhadap Loyalitas Muzakki Pada Badan Amil Zakat (Studi Kasus di Kecamatan Tegalsari Banyuwangi)' *ACTIVA: Jurnal Ekonomi Syariah* 1, no. 2 (October 25, 2018): 18-33.

Nfn Purwanto, 'Variabel Dalam Penelitian Pendidikan', *Jurnal Teknodik*, 6115 (2019), 196–215.

Waluya, Atep Hendang, and Aforisma Mulauddin, 'Akuntansi: akuntabilitas dan transparansi dalam qs. Al baqarah (2): 282-284,' *MUAMALATUNA* 12.2 (2020): 15-35.

Azizah, Wahidatul, and Andayani Andayani, 'AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI PENGELOLAAN DANA DESA,' *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA)* 11.10 (2022).

Siti, Khoiriah, and Meylina Utia. "Analisis sistem pengelolaan dana desa berdasarkan regulasi keuangan desa." *Masalah-Masalah Hukum* 46.1 (2017): 20-29.

ARTIKEL INTERNET :

Imanuel, 'Diduga Korupsi Dana Desa Ratusan Juta, Kejari Lamsel Tahan Kepala Desa Karya Tunggal', *Kupastuntas.Co*, 2020 <<https://kupastuntas.co/2022/05/23/diduga-korupsi-dana-desa-ratusan-juta-kejari-lamsel-tahan-kepala-desa-karya-tunggal>> [accessed 20 December 2022]

SKRIPSI :

Skripsi Ramadhani Ria Rizki, Persepsi stakeholders internal terhadap akuntabilitas dan transparansi laporan keuangan Universitas Sebelas Maret pasca ditetapkan sebagai badan layanan umum (studi kasus pada laporan keuangan tahun 2009), (Universitas Sebelas Maret, 2011).

Skripsi Alifah Nur Silvia, Akuntabilitas dan Transparansi dalam Pengelolaan Keuangan Desa Pengaruhnya Terhadap Tingkat Kepercayaan Masyarakat melalui Kredibilitas Aparatur Desa (Studi pada desa-desa di Kecamatan Bangsal Kabupaten Mojokerto), (STIE Malangku Cecwara, 2019)

WAWANCARA :

Ardi, "Program pengalokasian pengelolaan dana desa", *Wawancara*, Januari 03, 2023.

Rino Yahya, "Kinerja pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa", *Wawancara*, Desember 17, 2022.

Ahmadi, "Pemahaman Masyarakat tentang Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa". *Wawancara*, Januari 12, 2023.

UUD :

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014, 'Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari APBN', 2014, pp. 1–8

Peraturan KEMENDAGRI Nomor 113 Tahun 2014, 'Peraturan Menteri dalam Negeri No 113 Tahun 2014 tentang pedoman pengelolaan keuangan desa ', 2014.

